

Meneguhkan Spiritualisme Implementasi Moralitas Dalam Masyarakat

Dr. Akhiyat, M, Pd.

PUSTAKA RADJA

Meneguhkan Spiritualisme Implementasi Moralitas Dalam Masyarakat @ 2019

Diterbitkan Oleh Penerbit Buku Pustaka Radja, Juli 2019
Kantor: Jl. Tales II No. 1 Surabaya
Tlp. 031-72001887. 08124995403

ANGGOTA IKAPI

No. 137/JII/2011

Penulis : Dr. Akhiyat, M, Pd.

Editor : Prof.Dr. MN.Harisudin., M.Fil.I.

Layout dan desain sampul: Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-6690-54-8

viii+91; 14.5 cm x 20 cm

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Saw, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Tiada harapan sedikitpun dari kami kecuali buku ini dapat bermanfaat, memberi sumbangan positif kepada seluruh pembaca dan dapat menambah khazanah perbendaharaan pengetahuan bagi pembaca dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan pertolongan Allah SWT, kami yang dhoif ini telah diberikan kesempatan oleh Sang Maha Pemberi Petunjuk untuk dapat mengumpulkan dan menganalisa tulisan-tulisan kami yang tercecer dan tersebar di berbagai media massa. Pada akhirnya tersampaikan pula maksud kami untuk dapat mengumpulkan dan menjadikannya sebuah buku.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu mengumpulkan serta memilih dan memilah tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai media massa sampai akhirnya dapat dibukukan.

Sebagai manusia biasa, tentu penulis memiliki banyak kekurangan. Demikian pula dengan hasil karya tulis ini. Untuk itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan kami pergunakan sebagai bahan koreksi dan akan kami terima dengan senang hati. Selamat membaca!

Jember, 17 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

COVER ~i

KATA PENGANTAR ~ iii

DAFTAR ISI ~ iv

Bagian 1	Haji dan Makna Spiritualitas ~ 1
Bagian 2	Esensi Qurban: Transformasi Nilai Religiusitas ~ 4
Bagian 3	Sekolah Sebagai Media Pembelajaran ~ 8
Bagian 4	Desentralisasi Dunia Pendidikan ~ 12
Bagian 5	Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW.: Cerminan Uswatun Hasanah ~17
Bagian 6	Menyambut Maulid Nabi SAW ~24
Bagian 7	Manuver Politik Gus Dur – Wiranto ~ 23
Bagian 8	Di Balik Kunjungan Megawati ~ 27
Bagian 9	Hijrah Menuju Refleksi Kebebasan yang Bermoral ~ 31
Bagian 10	Isra' Mi'raj Cermin Moralitas ~ 35
Bagian 11	Antara Kekejaman dan Ketidakadilan Kanibalisme Ala Sumanto ~ 38
Bagian 12	Menjaga Netralitas Badan Intelijen Negara ~ 42
Bagian 13	Menuju <i>Self Awareness</i> Dalam Berfitri ~ 46
Bagian 14	Pejabat Berkampanye dan Ambisi Kekuasaan ~ 53
Bagian 15	Sekali Lagi, soal Goyang Inulisme ~ 56
Bagian 16	Mencermati Pernyataan Taufik Kiemas ~ 62
Bagian 17	Kegalauan PDIP Soal Pilkada ~ 65
Bagian 18	Peluang Duet Gus Dur – SBY Makin Terbuka ~ 67
Bagian 19	Gerakan Mahasiswa Menentang Otoritarianisme Baru ~70
Bagian 20	Peta Politik Pasca-Kasasi Akbar Tandjung ~ 74
Bagian 21	Menyikapi Kenakalan Anak ~ 78

Biodata Penulis ~ 81

Haji dan Makna Spiritualitas

Dalam ibadah haji terdapat banyak manfaat dan nilai-nilai pengajaran, baik untuk kepentingan hidup yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual, baik untuk duniawi maupun ukhrawi. Dari ritual ibadah haji itu sesungguhnya terdapat nilai sejarah yang cukup tinggi, yaitu berasal dari sejarah Nabi Ibrahim dan anak tercintanya Nabi Ismail as. Tempat yang kini dikunjungi oleh umat Islam dari segala penjuru dunia (*Baitullah*) itu adalah tempat Nabi Ibrahim as. bermunajat kepada Allah agar Allah menjadikan tanah Makkah yang tandus dan gersang itu menjadi tempat yang dihormati dan dijadikan hati umat Islam cenderung kepadanya.

Adapun manfaat ibadah haji antara lain adalah menumbuhkan ketahanan mental dan rohani. Hal ini terjadi karena orang yang melaksanakan ibadah haji akan bertambah ketekunan ibadahnya serta meningkat pula ketaqwaannya kepada Allah swt. Disamping itu, ibadah haji membuat orang yang menjalankannya semakin kuat tekatnya, disiplin, menyadari serta menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya sehingga pada akhirnya kecintaannya kepada Allah swt dan Rasul-Nya akan semakin meningkat dan bertambah.

Mengingat demikian besar manfaat ibadah haji yang terkandung didalamnya, maka kepada orang yang telah mampu diharapkan segera menunaikan ibadah haji, jangan pernah untuk menunda-nunda keberangkatannya, sebab barang siapa yang telah mampu melaksanakan ibadah haji tetapi tidak mau menunaikannya dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan syara' berarti ia telah meninggalkan kewajibannya dan keluar dari jalan ketaatan.

Rasullah telah menegaskan bahwa *"orang-orang yang berhaji dan berumrah merupakan duta-duta Allah. Jika mereka berdoa dikabulkan, dan jika minta ampun, Allah mengampuninya"*. Sebagai duta Allah bila sukses akan menjadi haji mabrur, dan itu berarti surga hadiahnya. Selain mendapatkan pahala berupa ampunan

dari segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga ia kembali laksana bayi yang suci dan bersih.

Diantara anugrah-anugrah Allah swt kepada manusia adalah adanya kesempatan –kesempatan dari Allah swt bagi semua hamba-hambaNya yang muslim untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka sehingga mereka akan memperoleh ridhaNya. Kesempatan untuk memperoleh pahala yang besar dari Allah swt tersebut yaitu dengan menunaikan ibadah haji.

Jika kesempatan yang begitu terbuka lebar menjanjikan ampunan serta pahala yang tidak terperiukan besarnya itu disiasikan oleh orang yang telah mampu atau kuasa untuk melaksanakannya, maka sabda Rasulullah saw berikut ini agar dicamkan serta dicermati dengan sungguh-sungguh *“barang siapa yang tidak terganggu oleh kebutuhan yang memaksa, sakit yang menyiksa atau penguasa yang dzalim namun ia tidak pergi haji sebaiknya mati saja seperti matinya orang Yahudi atau orang Nasrani”*.(HR. Baihaqi).

Adapun dalam pelaksanaan ibadah haji persoalan yang paling mendasar adalah mengerjakan rukun-rukun haji. Sebab kalau salah satu rukun itu tertinggal atau tidak dapat dilaksanakan, apapun yang menjadi sebabnya, maka haji itu akan menjadi batal atau tidak sah samasekali. Seperti diketahui, rukun-rukun haji ialah ihram, wukuf di Arafah, thawaf sekitar Ka’bah, sa’i antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul (memotong rambut), dan tertib. Selain rukun-rukun yang bersifat mendasar, ada hal-hal yang wajib, apabila uzur masih bisa dibayar dengan denda (dam) atau dapat diwakilkan, seperti melontar jumrah. Kemudian juga ada hal-hal sunnah lain yang dapat meningkatkan iman dan taqwa.

Adapun hikmah yang dapat ditarik dari ibadah haji itu antara lain dapat kita ambil dari salah satu rukun haji, misalnya ritualitas thawaf (mengelilingi Ka’bah). Ka’bah yang kita ketahui sebagai batu hitam yang berdiri tegak, diputari air mengalir dari lautan hidup bernama manusia-yang mengelilinginya dengan keadaan mengharu biru. Batu hitam itu laksana matahari, yang menjadi pusat edar dari sistem tata surya. Mereka semua bergerak secara bersama-sama dengan tanpa adanya identifikasi individual,

apakah yang pejabat, bawahan atau kuli, semuanya sama di hadapan Ilahi.

Pada saat itulah, ketika berada di pelataran Ka'bah, maka rupa-rupa keinginan dan syahwat keduniaan-apapun macamnya, haruslah segera dikosongkan, bersih dari segala noda yang senantiasa menghinggapi hati manusia. Sebab betapa nistanya, pada saat memasuki rumah Allah, kedirian kita masih penuh dengan kotoran-kotoran duniawi. Dengan mengosongkan dunia itulah, manusia akan sanggup menggapai luapan cintaNya. Karena itu, pada setiap kali menunaikan ibadah haji haruslah diniatkan semata untukNya. Sebab dengan kehampaan dunia, manusia akan dapat merasakan eksistensiNya.

Ritualitas thawaf itu setidaknya merupakan ruang transformasi manusia untuk lebur menjadi totalitas umat. Pada saat itulah secara reflektif mereka menyadari, bahwa sebuah individu hanyalah bagai setetes air. Dengan memutari Ka'bah, sesungguhnya manusia tengah berinteraksi dengan Sang Khalik, yang itu berarti sebagai penyerapan energi Ilahiah. Maka, pertemuan dengan Ka'batullah nan suci, segala rupa kepintaran dan akal-kecerdikan itu hendaknya disirnakkan senantiasa. Sebab Ka'bah adalah merupakan simbol awal perjalanan keapaadaan, yang hanya berisikan cinta dan daya serap ketertarikan demi menuju jalan cintaNya.**

DUTA MASYARAKAT, Senin, 26 Januari 2004

Esensi Qurban

Transformasi Nilai Religiusitas

Kepekaan anak Adam, tidak akan pernah ada manakala sendirian. Rasa simpatik, empati dan saling mengasihani akan muncul jika dihadapkan dengan kehadiran orang sekelilingnya. Disamping itu adanya situasi yang membuatnya terjepit, spontanitas akan terpanggil berbuat sesuatu. Termasuk kehadiran momen Idul Adha atau Hari Raya Qurban yang disebut juga Hari Raya Haji. Momen ini merupakan kesempatan (*Almunasabah*) bagi umat Islam untuk *fastabikul qoirot* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Bagi mereka yang mampu dalam materi, sehat jasmani dan rohaninya menurut syariat dianjurkan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarromah serta berqurban menyembelih hewan ternak.

Seruan Allah terhadap anjuran melaksanakan penyembelihan hewan qurban ini sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al Hajj ayat 34 yang berbunyi “ Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan menyembelih (qurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)” (QS. Al Hajj / 22:34).

Anjuran penyembelihan hewan qurban ini telah disyariatkan kepada umat Islam, khususnya umat Muhammad dan manusia pada umumnya bahwa firman Allah SWT tersebut supaya dipatuhi. Sebab umat-umat yang terdahulu dalam kutipan ayat “tiap-tiap umat” menunjukkan bahwa sebelum Muhammad lahir telah disyariatkan penyembelihan hewan qurban yaitu salah satunya ditujukan kepada Nabi Ibrahim as. Namun tidak menutup kemungkinan umat-umat sebelum Ibrahim as. juga ada tuntunan seperti itu, meskipun qurban yang tujukan kepada Allah dalam bentuk yang lain.

Sebagaimana dalam perjalanan sejarah kehidupan anak manusia, pengorbanan ini dicontohkan Habil dan Qabil. Peristiwa itu merupakan momentum yang masih memiliki relevansi dalam modern ini. Pengorbanan ini harus menampilkan keikhlasan dan ketulusan (*bikulli ikhlasin*). Habil adalah profil yang ikhlas sehingga apa yang dikorbankannya diterima oleh Allah, karena binatang yang dikorbankan itu bagus. Qabil mengorbankan hasil pertaniannya dengan kurang ikhlas, sebagian bagus, sebagian lagi busuk dan rusak sehingga korbannya tidak diterima Allah SWT.

Pengorbanan memang harus dilandasi niat yang ikhlas seperti profil Habil. Sebab di dalam Al Qur'an sendiri telah disebutkan. "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (Keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari pada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik" (QS, 22 : 37). Dengan ketakwaan itulah, maka Allah akan menerima amalnya (pengorbanan seseorang) dan karena hidayah-Nya itu supaya senantiasa mengagungkan Allah dan taat kepada-Nya serta berbuat baik terhadap sesamanya.

Pengagungan terhadap Allah ini salah satu bentuknya, dapat diwujudkan dengan pengorbanan tadi, penyembelihan terhadap hewan ternak. Dan dianjurkan menyebut nama Allah ketika menyembelih, kemudian makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Demikianlah Kami (Allah) telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS, 22 : 36).

Pengorbanan itu merupakan kekuatan dalam kehidupan. Pengorbanan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ruh perjuangan (*jihadun nafs*) yang mengandung nilai solidaritas antar sesama yang merupakan refleksi bagi umat manusia dalam meraih sebuah cita-cita. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebersamaan antar sesama baik dalam suka maupun duka. Solidaritas ini penting di saat orang lain membutuhkan bantuan.

Kerelaan berkorban ini mempunyai makna dan memiliki orientasi *ubudiyah*, *ijtimaiyah* dan *tarbiyah*. Orientasi *ubudiyah* berkorban merupakan ibadah yang diperintah Allah yang harus dilaksanakan secara tulus ikhlas. Orientasi vertikal atau *hablum minallahi* sebagai bentuk ketaatan seseorang. Sedang orientasi *ijtimaiyah* memberikan nilai kesetiakawanan sosial antar sesama manusia. Orientasi Horisontal atau *hablum minannas*, ini akan menghilangkan kecemburuan sosial antar si kaya dan si miskin. Dan sementara itu orientasi *tarbiyah* bagi pelaku yang berkorban memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial. Ini mendidik seseorang agar peka terhadap penderitaan orang lainnya, melahirkan sensitivitas yang melahirkan sikap empati terhadap sesama manusia.

Dalam kaitannya dengan ibadah qurban ini, untuk memaknai ibadah qurban itu sendiri. Di era krisis seperti ini, persoalan yang paling *urgen* untuk dikemukakan yaitu bagaimana penghayatan dan pengamalannya, sebagai refleksi cinta kita kepada Allah dan sesama manusia di hari Raya Qurban ini ? Apabila Ibrahim diuji dengan mengorbankan puteranya Ismail sebagai bukti ketulusan cintanya, lalu ketulusan cinta kita kepada Allah dan kepada sesama manusia di manifestasikan dengan mengorbankan apa ? Tentu, tidak lain bahwa bukti ketulusan cinta kita kepada Allah dan sesama hamba Allah, salah satunya yaitu dapat ditakar dengan seberapa besar harta yang kita korbankan lewat institusi infaq, sedekah, dan zakat kepada orang-orang yang di marginalkan secara ekonomi. Dalam konteks ini, hal tersebut sebagai manifestasi kepekaan seseorang untuk menumbuhkan kepedulian sosial dengan memberikan sumbangan nyata berupa materi bagi orang-orang lemah dan tertindas. Inilah hakikat dari penghayatan makna ritual ibadah qurban.

Hari Raya Qurban ini merupakan momentum yang tepat untuk menumbuhkan kepekaan, kepedulian, dan kerelaan mengorbankan sebagian harta yang kita miliki dengan membagikan daging qurban kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Apalagi krisis ekonomi, politik dan moralitas yang sampai sekarang mewarnai masyarakat kita. Kondisi ini bahkan diperburuk dengan datangnya musibah banjir, tanah longsor, peledakan bom dan sebagainya yang menimpa saudara-saudara

kita. Patutlah kiranya pelajaran kemanusiaan yang paling esensial dari ritus ibadah qurban yang diwariskan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada umat Islam.

Napak tilas perjuangan Khalilullah Ibrahim as. merupakan tauladan utama sepanjang masa. Sebagai soko guru dan sumber inspirasi dan aspirasi yang tak pernah ada habis-habisnya. Ibrahim as. termasuk generasi yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan orang lain. Kualitas perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan demi kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi atau kelompoknya cukup monumental. Beliau sanggup meninggalkan kesenangan dunia atau sikap hedonistik.

Tauladan semacam itu, sepertinya tidak diikuti oleh politisi, pejabat, bahkan ulama sebagai *warosatul ambiya'* kini. Mereka selalu memburu kesenangan dunia atau bermegah-megahan, berjuang dan berkorban untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang mengatasnamakan kepentingan *wong cilik*. Namun setelah mereka berkuasa kemudian lupa kepada orang-orang alit (*wong cilik*), mereka lupa jati dirinya. Padahal mereka menjadi nomor wahid dan besar lantaran orang-orang alit. Pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan wong cilik lakukan sudah tak terhitung lagi nilainya, berapa nyawa yang telah melayang menjadi tumbal pembangunan, korban harta benda dan tenaga yang telah mereka keluarkan demi meneriakkan kebenaran. Tidak sia-sialah pengorbanan mereka, semua orang tahu dan sejarah akan mencatatnya. **

DUTA MASYARAKAT, Jumat, 4 Pebruari 2003

Sekolah Sebagai Media Pembelajaran: Revitalisasi Terhadap Pendidikan Sebagai Sistem

Beberapa di antara para ahli mengemukakan pandangan tentang tujuan pendidikan. Paulo Freire mengemukakan bahwa pendidikan hendaklah membuat manusia menjadi transitif, yaitu suatu kemampuan menangkap dan menanggapi masalah-masalah lingkungan serta kemampuan berdialog tidak hanya dengan sesama, tetapi juga dengan dunia beserta segala isinya (Freire, 1994). Kemudian ia menambahkan bahwa pendidikan harus pula membekali manusia suatu kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap kecenderungan semakin kuatnya kebudayaan industri, walaupun kebudayaan itu dapat menaikkan standart hidup manusia.

Selanjutnya Alvin Toffler (1987) berpendapat bahwa masa sekarang tidak sama dengan masa yang akan datang. Teknologi dan manusia mempunyai peranan yang berbeda. Teknologi masa depan akan menangani arus informasi dan wawasan. Sebab itu kegiatan manusia akan semakin terarah kepada tugas intelektual sebagai pemikir dan kreatif. Bukan hanya melayani mesin-mesin.

Dari pandangan beberapa ahli tersebut mengenai tujuan pendidikan serta pengaruhnya terhadap manusia dan lingkungannya, maka untuk meninjau pendidikan hendaknya tidak secara parsial. Pendidikan hanya dianggap sebagai suatu bentuk yang bersifat penggemblengan saja atau alih transfer ilmu dari seorang guru terhadap murid (anak didik). Lebih dari itu pendidikan mempunyai maksud yaitu membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya yang berarti pula membudayakan manusia.

Pendidikan, dalam ranah komprehensif, dilihat dari berbagai bentuknya, apakah pendidikan sekolah atau pendidikan luar sekolah, agar tidak menyimpang dari tujuan dan fungsinya, maka

untuk memahami pendidikan perlu persepsi yang benar. Tujuan ini mempunyai pandangan bahwa sekolah merupakan media pembelajaran yang mana pendidikan sebagai sistem perlu diperbaharui atau ditata ulang (revitalisasi). Membutuhkan suatu kesatuan dengan berbagai komponennya yang saling berkaitan.

Suatu pandangan Immegart (1972) mengatakan esensi sistem adalah merupakan suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis, bagian-bagian itu berealisasi satu dengan yang lain, serta peduli terhadap konteks lingkungannya. Pendapat tersebut dapat ditangkap bahwa sistem itu memiliki struktur yang teratur. Sistem ini terdiri dari beberapa sub sistem, setiap sub sistem mungkin terdiri dari beberapa sub sistem. Selanjutnya setiap sub sistem mungkin terdiri beberapa sub-sub-sub sistem, begitu seterusnya sampai bagian itu tidak dapat dibagi lagi yang disebut komponen.

Pendapat Immegart tersebut menggambarkan bahwa sistem itu adalah sebagai suatu strategi, cara berpikir, atau model berpikir. Ini berarti ada model berpikir sistem dan ada pula model berpikir non sistem (Pidarta, 1997:26). Demikian halnya dengan pendidikan agama secara sistem akan menekankan pada semua aspeknya secara berimbang seperti pemahaman, hafalan, penghayatan, tindakan sehari-hari, pergaulan di masyarakat, dan sebagainya. Tetapi bila melaksanakannya dengan non sistem, mungkin akan menekankan persembahyangan saja, atau hafalan saja dengan menomorduakan yang lain. Secara konsep berpikir secara sistem dipandang lebih baik dari pada secara non sistem dalam melaksanakan atau menyelesaikan masalah tertentu.

Pendidikan sebagai sistem, tentu tidak mungkin akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik bila ia mengisolasi diri dengan lingkungannya. Pendidikan berada di masyarakat, ia adalah milik masyarakat. Itulah sebabnya pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah/sekolah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena keberadaan pendidikan seperti itu, maka apa yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat akan berpengaruh pula terhadap pendidikan.

Menyadari hal itu, menunjukkan bahwa arus globalisasi terhadap kehidupan masyarakat saat ini menerjang semua batas

kehidupan. Batas antara negara dan kawasan tidak menjadi halangan bagi proses interaksi antar warga dunia. Meminjam istilah Alvin Toffler, umat manusia saat ini memasuki kawasan masa depan yang belum terpetakan, *terra incognita*. Di satu sisi, kita dibanjiri banyak informasi dan pengetahuan yang mudah diakses dari sumber pertama meski secara geografis dipisahkan samudra luas. Di sisi yang lain, banjir informasi, data, dan pengetahuan membuat kita bingung memilih. Kita justru semakin kurang pengetahuan, pada saat pengetahuan berlebih-lebihan (Surabaya News, 12/1/2003).

Kalau dahulu mengejar data, informasi dan pengetahuan di sekolah/universitas Eropa dan Amerika, sekarang pengetahuan itu "mengejar" kita sampai ke wilayah pribadi di sudut-sudut rumah kita. Jadi, masihkah sekolah dan universitas diperlukan? Inilah pertanyaan kritis koreksi bagi kita. Di tengah ketidakmampuan sekolah atau universitas menghadapi kenyataan hidup dan tidak dibekalinya para siswa menjadi "manusia pembelajar" maka yang muncul dalam benak kita bukan berarti reformasi atau perombakan, tapi perlu memperhatikan "misi terselubung" sekolah.

Bukanlah berarti sekolah dan universitas perlu dibubarkan, tapi bagaimana dinamikanya sekolah dan universitas agar relevan dengan perkembangan jaman dan tetap diminati masyarakat. Setidaknya ajaran universitas atau kurikulumnya serta pendidikan sebagai sistemnya perlu ada pembenahan dan pembaharuan. Kemudian guru-guru dan dosen-dosen perlu diajak belajar kembali (*relearn*) dalam arti memeriksa dan mempertanyakan ulang asumsi-asumsi yang selama ini mereka pergunakan untuk memandu proses pembelajaran di sekolah dan universitas. Mereka perlu memikirkan kembali hakikat, tugas dan tanggung jawab, peran dan panggilan sebagai pengajar (Andris Harefa, 2002:37).

Adanya fenomena-fenomena yang kurang relevan tersebut, maka sekolah dan universitas harus berhenti mengusahakan agar lulusannya atau alumninya menjadi sekadar "siap pakai" tapi harus lebih berkonsentrasi agar orang-orang muda jadi "siap hidup" dalam masyarakat di mana persoalan-persoalan hidup datang silih berganti tak habis-habisnya. Sebab dalam kurun waktu cukup lama universitas benar-benar telah menjadi menara

gading yang jauh dari masyarakat dan kehidupan nyata sekitarnya. Universitas harus berhenti “memproduksi” beo-beo dan mesin-mesin penghafal yang melecehkan potensi manusia sebagai satu-satunya ciptaan Sang Pencipta yang dianugerahi daya cipta untuk mencipta dalam proses belajar berbakti, beriman, dan bertaqwa hanya kepada Sang Pencipta.

Dengan demikian, maka sekolah tidak cukup mampu membekali kaum muda hidup di abad ke-21 yang diwarnai dinamika perubahan begitu cepat. Apa yang diajarkan sekolah seringkali tidak relevan dengan kenyataan. Sekolah tidak mendidik siswa menjadi manusia kreatif dan mandiri, logis jika pengangguran terdidik setiap tahun bertambah (wajar bila revitalisasi terhadap pendidikan sebagai sistem segera ditata ulang kembali). Selain itu masyarakat telah salah kaprah memahami dan memakai istilah “lembaga pendidikan” untuk menunjuk sekolah maupun universitas. Padahal pendidikan berarti *educare*, selalu informal, dan tidak mungkin formal, atau diformalkan. Yang mungkin diformalkan atau dilembagakan adalah pembelajaran.

Mengutip Kiyokasi, pengajaran yang baik bermuara pada kesempatan untuk menjadi kaya raya. Namun menjadi kaya sebenarnya hanya baik bila menjadi sasaran antara untuk dapat mencapai tujuan lebih mulia, yakni menjadi manusia yang utuh dalam arti *pertama*, dapat mencukupi nafkah hidup pribadi dan/atau keluarga. *Kedua*, dapat menjalankan peran sosial sebagai warga negara, dan warga dunia yang bertanggungjawab. *Ketiga*, dapat berubah secara mental psikologis menjadi dewasa dan mandiri. *Keempat*, dapat membuat memahami hakikat dirinya sebagai makhluk moral spiritual.

Jadi *out put* pembelajaran tidak boleh diukur dengan ukuran tunggal berupa kekayaan, tetapi mencakup lebih banyak hal. Lebih tegas lagi pembelajaran harus mengarahkan kaum muda semakin mampu memanusiaawikan dirinya, orang lain di lingkungannya, masyarakat, dan bangsa. **

MPA, Ed. 198 Maret 2003

Desentralisasi Dunia Pendidikan

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini masih banyak mengacu pada aturan-aturan pusat. Kurikulum nasional telah banyak mengekang dan kurang banyak memberi kesempatan untuk mengembangkan dunia pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tanah air, meskipun tidak memungkiri ada pula keberhasilannya. Namun pada sisi kelemahannya kita juga harus mengakui mengapa dunia pendidikan yang ada di tanah air Indonesia perkembangannya kurang begitu memuaskan bila kita bandingkan dengan negara-negara lain. Ambil contoh saja negara Jiran Malaysia, negeri ini pada saat tahun delapan puluhan banyak menelorkan para Doktor dan Profesor, sebab di awal pemerintahan Mahatir Muhammad menjabat Perdana Menteri masalah pendidikan diutamakan dan diperhatikan, para pelajar di negeri itu banyak yang distudikan ke mancanegara seperti Amerika, Timur Tengah, Jepang dan lainnya. Sedangkan negara kita semasa Orba dunia pendidikan kurang begitu mendapat perhatian. Modal negara pada saat itu banyak difokuskan pada pendanaan bidang pertanian, dan bidang ekonomi saja tapi segi manajemen tidak diperhatikan, seperti adanya KUK (Koperasi Usaha Kecil) dan semacamnya di tahun tujuh puluhan. Sedang masyarakat saat itu pendidikannya mayoritas masih rendah, jadi semua usaha yang diprogramkan oleh pemerintah banyak kegagalannya dan sia-sia, dana yang disalurkan banyak mengalami penyimpangan dan penggunaan yang lebih terkenal saat ini dengan KKN. Mengapa demikian, sebab masyarakat belum mampu memenej dan mengolah dana yang ada secara proporsional dan profesional. Kendala inilah merupakan problem untuk difikirkan bagi bangsa Indonesia bagaimana sikap para pelajar kita di saat krisis dalam segala bidang, terutama krisis kepercayaan, sebab di era reformasi inilah pijakan kita untuk membangun bangsa secara demokratis dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya guna membentuk masyarakat madani (*civil society*).

Kurangnya keberhasilan dunia pendidikan saat ini banyak disebabkan beberapa faktor, namun di antaranya yang paling krusial adalah keberadaan “sistem pendidikan” di Indonesia itu sendiri. Inilah yang mewarnai proses belajar mengajar. Adanya sistem pendidikan secara “sentralisasi” telah membawa persoalan mengapa pendidikan di Indonesia patut dipertanyakan?

Pendidikan di Indonesia pada masa Orba terlalu banyak dipengaruhi oleh campur tangan kekuasaan yang begitu kuat dengan segala macam tekanan dan penindasan sehingga pengembangan ke arah keilmuan dan keintelektualan kurang begitu penting diperlukan. Sedangkan pendidikan yang ada saat itu hanya sebagai kamufase demi memenuhi tuntutan kepentingan kaum penguasa, hingga akhirnya membawa kehancuran bangsa yang parah seperti sekarang ini. Moral seperti sudah tak ada harganya lagi, sesama saudara saling cincang, ganyang dan menjegal membawa petaka di mana-mana seperti terlihat di media massa, baik elektronik maupun non elektronik.

Dari sisi lain kalau dikaji ulang sistem “sentralisasi” ini mengakibatkan dominasi pendidikan dan terjadinya kesenjangan pendidikan (*education distance*), dari 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya beberapa persen yang dapat studi sampai perguruan tinggi dan masih banyak lagi rakyat yang hidup di pelosok-pelosok pedalaman belum menikmati pendidikan. Hal ini dapat diakui bahwa sistem pendidikan sentralisasi atau katakanlah di masa Orba pendidikan tertuju di kantong-kantong pemerintah pusat. Kurikulum yang harus sesuai dengan ketentuan pusat, kebijakan-kebijakan yang seharusnya diambil alih oleh lembaga bersangkutan semua bergantung dan terletak pada penguasa, dari lokal, daerah maupun pusat sudah terbentuk sistem demikian rapi yaitu sistem “sentralisasi”. Jadi lembaga-lembaga pendidikan yang punya institusi pengembangan tidak bisa berpikir secara bebas, kritis dan berkembang secara jelas dan obyektif. Pengembangan ke arah intelektual, moralitas dan keilmuan secara ilmiah, obyektif buat anak didik kurang mendapat peranannya. Pendidikan kelihatan formalitas belaka yang pada dasarnya nilai-nilai etika, moral dan pengembangan keilmuan merupakan omong kosong belaka.

Kasus kerusuhan, penjarahan, pengrusakan dan kebrutalan menandakan bukti betapa mudahnya rakyat Indonesia terprovokasi dengan adanya isu-isu yang menyesatkan. Semua tidak lain rendahnya mutu pendidikan bangsa Indonesia dan kebodohan yang masih banyak melekat di hati rakyat serta nilai-nilai moral yang rendah. Ketimpangan sosial selama ini dan rendahnya mutu pendidikan sebagian besar banyak disebabkan terpusatnya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatur dunia pendidikan, sebab jangkauan dan kondisi di mana lembaga-lembaga pendidikan berada, pemerintah kurang mengerti akan kepentingan-kepentingan dan keadaan daerah setempat.

Dalam UU RI No.2 Tahun 1989 dijelaskan tentang pendidikan nasional Pasal 38 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. Menurut pasal ini ada dua macam kurikulum yaitu kurikulum nasional dan kurikulum setempat. Kurikulum nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat sedangkan kurikulum lingkungan ditetapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang bersangkutan beserta badan lain yang berhubungan dengan badan lain yang berwenang untuk itu.

Melihat kenyataan sekarang, kurikulum nasional telah mengalinsi dan membelenggu perkembangan keilmuan pada lembaga-lembaga yang berwenang menyelenggarakan pendidikan. Sebagaimana misalnya di lembaga pendidikan Gontor, lulusan dari lembaga itu ijazahnya tidak diakui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bila mereka melanjutkan ke jenjang selanjutnya sesuai bidangnya, hal ini terkesan arogansi pemerintah dalam memandang lembaga-lembaga yang ada di Indonesia jika tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Kenyataan itu kita tahu bahwa lulusan Gontor oleh pendidikan-pendidikan Barat dan Timur Tengah lembaga itu diakui alumninya bila studi di sana. Namun bila melanjutkan di negeri sendiri para siswa terpaksa harus mengikuti ujian persamaan seperti yang diharapkan pemerintah.

Adapun kurikulum nasional dan kurikulum lokal setidaknya, lembaga-lembaga yang sudah mampu dan siap segala sarana-prasarananya bisa diberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena kurikulum tersebut sebagai standart saja, maka lembaga-lembaga seperti itu bisa melaksanakan tugasnya melebihi target dari kurikulum nasional dan menambahkan kurikulum muatan lokal sebagaimana diprogramkannya. Jadi kurikulum nasional hendaknya tidak kaku, selebihnya bersifat fleksibel tergantung dari lembaga yang ada sesuai dengan kemampuan lembaga-lembaga di mana mereka berada. Meskipun tidak bisa menyamai seperti yang diharapkan kurikulum nasional, sedapat mungkin mencapai tujuan yang semaksimal sesuai dengan apa sasaran target pencapaiannya. Misalnya saja di daerah luar Jawa karena banyak hutan di tempat-tempat itu maka tujuan lembaga pendidikannya berwawasan lain, berbeda dengan wawasan pendidikan yang ada di Jawa. Bisa dimungkinkan bidang-bidang penelitian banyak difokuskan di Kalimantan, Irian Jaya dan pulau-pulau lain untuk memungkinkan pengembangan sumber daya alamnya yang belum banyak tergarap. Seperti laboratorium dan sarana penelitian lain dibutuhkan perhatian, tidak terfokus hanya di pulau Jawa. Ini pula faktor penyebab terjadinya kesenjangan di dunia pendidikan, karena para pakar-pakar enggan untuk pindah ke luar Jawa, semua terfokus pada pusat, sedang luar Jawa dan daerah-daerah terpencil kurang mendapat perhatian.

Desentralisasi

Sebagai upaya menyiasati adanya kesenjangan pendidikan di Indonesia maka dibutuhkan suatu alternatif lain yaitu dari sistem pendidikan secara "sentralisasi" diganti dengan sistem "desentralisasi" bahwa daerah-daerah diberikan otonomi untuk menyelenggarakan pendidikan nasional sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh daerahnya sendiri. Meskipun kurikulum nasional diperlukan akan tetapi pusat memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengarahkan kurikulum dan ketetapan-ketetapan pusat disesuaikan dengan kebijakan daerahnya. Aturan dan perundang-undangan menyangkut dunia pendidikan dimusyawarahkan dengan daerah bukan hanya bergantung pada

pusat. Sebab situasi dan kondisi di daerah-daerah tidak mungkin terkontrol dengan cermat, di samping banyaknya keberadaan lembaga, juga sulitnya jangkauan medan lapangannya. Tentang gaji guru SD di Irian Jaya misalnya bila dibandingkan nilai kurs dengan gaji guru di Jawa ternyata perbedaannya cukup jauh sebab barang-barang di sana harganya cukup tinggi dari pada di Jawa. Fenomena-fenomena demikian bila tidak segera diatasi bagaimana kelangsungan kehidupan dunia pendidikan di masa mendatang. Oleh karena itu semua masyarakat diperlukan keseriusan menanggapi fenomena tersebut, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para warga masyarakat seluruhnya.

Mengenai kurikulum muatan lokal, lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya memberikan pelajaran tambahan saja. Melainkan bisa dalam wujud lain, misalkan di daerah perindustrian bisa menerapkan norma sikap disiplin dalam bekerja, daerah pertanian bisa menyelenggarakan pendidikan sesuai cara-cara mengembangkan agrobisnis, daerah perhutanan dengan cara bagaimana meningkatkan hasil hutan yaitu menanam tanaman-tanaman produktif, daerah wisata dengan menekankan pada penggunaan bahasa Inggris secara praktis dan banyak macam wujud lainnya.

Tentang sistem penilaian dalam UU No.2 1989 pada Pasal 44 berbunyi: Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan atau jenjang pendidikan secara nasional. Dalam kalimat ini ada kata dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar. Ini berarti boleh juga tidak menyelenggarakannya. Dari ketetapan ini maka hasil belajar tidak mutlak harus diadakan, lembaga-lembaga bersangkutan bisa menilai dengan obyektif tentang hasil belajar murid-muridnya. Untuk itu sebagai alternatifnya sistem "desentralisasi" bisa diwujudkan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk mendapatkan peserta didik berkualitas, bermoral, profesional dan bertaqwa sebagaimana dicita-citakan bangsa. **

MPA, Ed.151 April 1999

Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW Cerminan Uswatun Hasanah

Manusia utama yang tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Muhammad SAW, termasuk salah satu di antara anak manusia yang telah dipilih Allah SWT selaku utusan-Nya untuk menerangi kegelapan hati manusia. Dengan ajaran-ajarannya yang luhur beliau tulus ikhlas menyampaikan amanat Allah SWT kepada umat manusia.

Sejarah telah mencatat bahwa Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awwal, tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi itu terkenal dengan *Tahun Gajah*, karena pada saat itu kota Mekah diserang oleh pasukan tentara yang kuat dibawah pimpinan Abrahah, gubernur dari kerajaan Abresinia yang memerintah di Yaman, dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah.

Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. Namun, belum sampai maksud buruk mereka tercapai, mereka sudah dihancurkan oleh Allah SWT dengan mengirimkan burung ababil. Oleh karena pasukan yang ingin menggempur Ka'bah tersebut mempergunakan gajah, maka orang Arab menamakan bala tentara itu pasukan bergajah, sedang tahun terjadinya peristiwa itu disebut *Tahun Gajah*, hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Fiil ayat 1 sampai 5.

Kehadiran Nabi Muhammad SAW di dunia ini, mempunyai tujuan untuk meluruskan umat manusia agar kembali hanya menyembah Allah SWT, berlaku baik kepada sesama manusia serta kepada makhluk-makhluk lainnya di dunia ini. Sehingga dengan kehadiran beliau SAW ini, umat manusia secara keseluruhan di dalam kehidupan mereka senantiasa diwarnai dengan budi pekerti yang luhur atau moral agama yang berdasarkan wahyu Allah SWT yang disampaikan beliau. Dengan demikian, kehadiran beliau benar-benar telah membawa

perubahan di dalam segala segi kehidupan manusia menuju ke arah kebaikan.

Tugas berat dari Allah SWT yang dijalankan Rasulullah SAW ini adalah membawa ajaran yang benar dan membawa amanat Allah berupa agama Islam sebagai pedoman hidup yang lurus yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Dengan mengikuti tuntunan atau ajaran beliau SAW, kita akan dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Kitabullah Al-Qur'anul Karim yang artinya: *"Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang mereka kerjakan"* (QS. Al-An'am:126-127).

Dalam kenyataan kehidupan yang kita jalani sehari-hari kita hidup di dalam suatu lingkungan atau tatanan masyarakat di mana hubungan antar pribadi di dalamnya menjadi suatu kebutuhan mutlak mengingat fungsi sosial yang melekat pada diri kita masing-masing. Oleh karenanya, sikap terpuji seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW seharusnya menjadi satu acuan atau contoh bagi umat manusia dalam bertindak dan berlaku.

Jika masing-masing dari individu selaku warga masyarakat dalam suatu tatanan kecil atau warga bangsa dalam cakupan yang lebih luas telah mempraktekkan apa yang telah diteladankan Rasulullah SAW, maka kebesaran atau kejayaan bangsa akan dapat diraih, mengingat keluhuran atau kebesaran suatu bangsa dinilai dari keluhuran budi pekerti seluruh anak bangsa selaku komponen utama bangsa itu.

Islam merupakan suatu tuntunan bagi penganutnya, di mana memerlukan perjuangan dan pengabdian dari para pemeluknya. Berjuang keras dan mengabdikan demi meraih suatu kondisi kehormatan yang menjadi cita-cita manusia, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dalam rangka pengabdian secara tulus ikhlas kepada Illahi Rabbi.

Maka, jelaslah bahwa pribadi Rasulullah SAW merupakan cermin keteladanan yang hendaknya digunakan untuk memperbaiki akhlak yang kurang baik. Marilah ditanamkan

ajaran-ajaran akhlak Islam kepada anak cucu, agar mereka kelak menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti tinggi yang merupakan harapan masa depan bagi generasi yang akan datang sebagai pengganti generasi saat ini yang akan melanjutkan cita-cita Islam menuju keridhaan Allah SWT.

Dengan risalah yang dibawa Rasulullah SAW tersebut diharapkan dapat mewujudkan keadilan, kebenaran yang berlandaskan hukum Allah SWT menuju perdamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta dapat membawa amanat kemanusiaan yang mengatur pribadi seseorang, masyarakat dan bahkan negara dengan mengutamakan pembinaan akhlak yang mulia. **

RADAR SURABAYA, Rabu, 14 Mei 2003

Menyambut Maulid Nabi SAW

Lima belas abad yang lampau, pada bulan Rabiul Awwal dalam tahun yang berbeda-beda, tercatat dalam sejarah tiga peristiwa perubahan besar (revolusi) yang meletakkan dasar-dasar kemajuan dan pembangunan. Pertama, di jazirah Arab lahir seorang putera yang kemudian diberi tugas oleh Penguasa Tunggal menjadi utusan Allah (Rasulullah dan menjadi rahmat untuk seluruh dunia (*rahmatan lil-alamin*).

Kedua, sesudah `13 tahun melaksanakan tugas di tanah air yang dicintainya, beliau Nabi Muhammad SAW terpaksa menyingkir dari tanah tumpah darahnya, sebagai satu strategi untuk merebut kemenangan kembali sepuluh tahun kemudian.

Ketiga, pada bulan Rabiul Awwal juga, beliau dipanggil ke hadirat Allah SWT kembali dengan meninggalkan *Pegangan Hidup* yang menjadi *Pedoman* untuk kesejahteraan hidup manusia, kini dan nanti. Figur itu adalah nabi Muhammad SAW.

Dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang disampaikan Allah SWT kepada beliau sebagai wahyu, penuh dengan ungkapan-ungkapan yang harus dijadikan panutan, suri tauladan (*uswatun hasanah*) untuk mencapai kemakmuran hidup dalam arti yang seluas-luasnya.

Salah satu aset yang menonjol ialah tentang budi pekerti (akhlak) beliau, yang disebutkan oleh Allah SWT sendiri pada ayat "*Sesungguhnya engkau (Ya Muhammad) mempunyai budi pekerti yang agung*" (QS. Al-Qalam:4).

Sebagai utusan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW adalah sosok pribadi yang sangat terpercaya. Apakah dalam tutur kata maupun dalam sikap serta tindakannya. Beliau adalah sosok panutan umat manusia yang tidak ada seorang pun di dunia ini hingga kelak di akhir jaman yang dapat menyamainya.

Bukan hanya umat Islam yang mengakui keluhuran budi pekerti Nabi SAW, namun umat lain pun secara sadar mengacungkan ibu jarinya atas kesalutannya perihal pribadi

Rasulullah. Tercatat ilmuwan Michael Hart dalam bukunya *Seratus Tokoh yang Berpengaruh Di Dunia*, menempatkan diri Rasulullah SAW di peringkat teratas alias nomor satu.

Mengapa ilmuwan Barat tersebut menempatkan diri Rasulullah SAW selaku orang yang paling berpengaruh di dunia ini? Hal itu karena keluhuran budi serta perilaku baginda Nabi. Tidaklah mengherankan hal itu, karena yang memilih seorang manusia menjadi utusan-Nya adalah Allah SWT sendiri yang serba Maha Mengetahui perihal sikap dan tindakan dari seluruh makhluk-makhluk ciptaan-Nya.

Akhlaq Rasulullah SAW itu kalau diibaratkan laksana mutiara yang perlu diangkat ke permukaan agar memancarkan cahaya yang kilau-kemilau itu ke sekitar lingkungannya.

Dalam ayat Al-Qur'an surat Ali-Imran 159 terdapat beberapa mutiara kehidupan Rasulullah yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, yaitu lemah lembut, pada ayat tersebut dipergunakan perkataan '*linta lahum*' artinya lemah lembut. Menurut buku "*Kalimatul Qur'an, Tafsir wa Bayan*," pengertian kata-kata *linta lahum* itu adalah sikap yang luwes, jangan bertindak kejam. Sifat tersebut digambarkan laksana besi baja yang mempunyai kekuatan daya tarik, bisa mendekatkan yang jauh, merapatkan yang renggang, dapat melunakkan sikap yang keras kepala, melembutkan hati yang kesat, menundukkan jiwa yang kasar, sehingga akhirnya menimbulkan harmoni.

Kedua, tidak bersikap kasar dan bengis. Pada ayat tersebut terdapat kata-kata "*faddon*" maksudnya kasar dalam pergaulan, baik ucapan maupun perbuatannya. Sikap kasar dan bengis itu bersumber dari hati yang kesat (*ghalizal-qalbi*), busuk hati, jiwa yang diselubungi penyakit rohaniah, yang membuat seluruh kehidupan menjadai kasar. Nabi Muhammad SAW dipesankan oleh Allah SWT supaya jangan bersikap kasar dan bengis. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah seorang pemimpin yang ramah, luwes (*fleksibility*) dan mempesona (*simpatik*).

Ketiga, pemaaf dan memohonkan ampunan. Rasulullah SAW samasekali tidak menaruh rasa dendam. Sikap itu bukan saja mengenai soal-soal kecil, tapi juga senantiasa memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan atau tindakan kasar yang mengenai kepentingan masyarakat dan umat. Hal itu ada yang

menggambarkan satu anekdote kepemaafan Rasulullah sebagai seorang pahlawan.

Keempat, musyawarah, yakni melakukan kompromi sebagai suatu ajaran Islam yang bersifat mendasar (fundamental). Musyawarah itu dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang belum ada garis-garisnya.

Dan yang kelima, yaitu berserah diri (tawakkal). Rasulullah diperintahkan lebih dahulu berusaha, berjuang, berikhtiar. Tidak boleh menyerah sebelum berbuat suatu apa. Tawakkal ini haruslah didahului dengan ikhtiar dan perjuangan. Sesudah itu, barulah semua permasalahan tersebut dikembalikan kepada Illahi Rabbi.

Dengan beberapa teladan Rasulullah SAW tersebut, diharapkan umat manusia ini dapat mengambil hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupannya. Hidup dengan siapa saja, apakah dengan manusia lainnya, binatang, lingkungannya dan terhadap makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan demikian akan terjalinlah kehidupan yang harmonis sesuai dengan tuntunan agama dan masyarakat.**

DUTA MASYARAKAT, Selasa, 13 Mei 2003

Manuver Politik Gus Dur – Wiranto

Mendekati Pemilu tinggal beberapa hari lagi kali ini ada saja manuver politik yang dilakukan Gus Dur. Bukanlah Abdurrahman Wahid namanya jika tidak melakukan tindakan-tindakan *nyleneh*, begitulah pendapat sebagian pendukung fanatiknya. Sudah sejak tiga tahun berlalu, hubungan Gus Dur – Wiranto terjadi gap (*opposite*), Wiranto dipecat dari jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan ketika saat itu Gus Dur masih menjabat Presiden 1999-2001. Tetapi mulai saat ini nampaknya hubungan keduanya serasa sudah mulai cair, ketika keduanya Selasa pagi (17/2) dalam agenda acara menghadiri pernikahan putra dan putri KH Faqih di Langitan.

Apa yang dilakukan Gus Dur bergandengan dengan Wiranto ketika berkunjung dalam hajatan tersebut, setidaknya mengindikasikan ada upaya-upaya tertentu atau apabila ada penilaian *miring* mungkin dari rival-rival politik Gus Dur dan Wiranto. Pertemuan kedua tokoh itu dapat juga mengindikasikan bahwa Gus Dur ada semacam *deal-deal* politik (baca : kesepakatan politik) dengan Wiranto, apa yang telah diagendakan dalam menghadapi Pemilu tahun ini. Mengingat dari perkembangan politik yang baru saja terjadi, yakni bebasnya Akbar Tandjung membuktikan bahwa ada semacam kekuatan *status quo* mulai bangkit kembali (*resurgence*). Yakni untuk menyusun kekuatan memperebutkan kursi di jajaran legislatif maupun eksekutif.

Perkembangan politik yang terjadi menjelang Pemilu inilah yang sebenarnya menjadi perhatian bagi masyarakat. Terutama Gus Dur untuk mengcounter kekuatan *status quo*. Apalagi menurut perkiraan opini yang berkembang, bahwa vonis Mahkamah Agung (MA) membebaskan Akbar tidak lain bisa diakibatkan permainan konspirasi politik (*political conspiracy*) tingkat tinggi dalam perhelatan yang diperankan aktor-aktor yudikatif (Mahkamah Agung) dan eksekutif (Pemerintahan Megawati). Dan menurut sebagian pengamat politik ada upaya bebasnya Akbar

sebagai balas jasa Megawati atas keberhasilan Akbar melengserkan Gus Dur dan menaikkan Megawati di kursi Kepresidenan hingga kini.

Dari perhelatan inilah, logis jika Gus Dur memainkan wacana publik bagaimana untuk menangkal (*counter*) kekuatan dari kedua kubu, yakni Megawati sebagai simbol dari kekuatan PDIP dan Akbar Tandjung sebagai simbol kekuatan Partai Golkar. Di mana keduanya termasuk pemain lama, bagian dari parpol di jaman Orba. Secara otomatis orang-orang yang masuk di jajarannya di dalam Kabinet Gotong Royong itu mayoritas dapat dikatakan sebagai kekuatan yang *pro-status quo* dan masih menjadi perhitungan pemain baru (Gus Dur) semenjak genderang reformasi 1998 didengungkan.

Dinamika politik inilah, barangkali menurut perhitungan sebagai wacana yang dimainkan Gus Dur kali ini. Dia mencoba *deal* politik dengan Wiranto, yang bisa berarti ada upaya untuk menggagal kekuatan massa kaum reformis dan menggait militer (Wiranto) – dari Calon Presiden (Capres) konvensi Partai Golkar – atau kekuatan Golkar lainnya yang berseberangan dengan Akbar. Bila Gus Dur hanya menggagal kekuatan sipil semata dan tidak menggagal kekuatan militer (baca : Wiranto) atau berkoalisi dengan parpol gemuk (besar) sangat muskil akan dapat mewujudkan impiannya jika diabaikan begitu saja.

Meskipun dari situasi yang ada menampakkan kaum reformis tidak menghendaki lagi militer dan Partai Golkar untuk tampil ke permukaan. Namun rupa-rupanya dari perkembangan politik yang terjadi (*situation of development political*) di masyarakat seakan mereka masih menghendaki militer untuk tampil ke permukaan. Argumen ini dapat terbantahkan, bahwa masyarakat mana yang menghendaki militer agar tampil lagi di tingkat legislatif maupun eksekutif. Tentunya yang menghendaki adalah sudah jelas dari kalangan militer sendiri yang hampir selama 32 tahun menikmati kejayaannya, ditambah lagi dari kalangan yang pro terhadap militer termasuk dalam hal ini kekuatan *status quo* dan para pengusaha yang umumnya memiliki modal lebih, mereka mendambakan keamanan dan kenyamanan (mendapat *backing* militer) untuk melindungi dan menyelamatkan kekayaannya.

Logikanya, dari pemilik modal ini, mereka dengan mudahnya untuk menguasai, menggerakkan, dan memobilisir massa yang begitu massif dengan iming-iming sepersen uang atau dalam bentuk lain akan mengikuti apa jejak dan kehendak mereka yang menguasai modal dan kekuatan (menggenggam kekuatan militer), sehingga mereka dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif di masyarakat. Meminjam istilah Huntington dalam karya monumentalnya "*Political Order in Changing Societies*" di mana negara Dunia ketiga (Indonesia) cenderung masyarakatnya yang *proetarian* yaitu situasi di mana mobilisasi atau tingkat partisipasi politik massa cenderung berjalan terlalu cepat dibanding institusional- institusionalisasi politik. Sehingga pada gilirannya kekuatan sosial akan saling berhadapan secara telanjang. Apalagi pengangguran yang hingga kini makin meningkat, disertai pendidikan yang terbilang rendah sangat logis memicu konflik dan kekerasan. Dari realita yang ada di masyarakat sangat memungkinkan sekali suasana demikian telah diskenario oleh para penguasa modal maupun oleh kekuatan lainnya (*backing* militer).

Sungguh sangat ironis sekali, jika melihat perkembangan socio-politik yang terjadi belakangan dengan ekonomi dan pendidikan masyarakat yang dapat dibilang kemampuannya *pas-pasan*, atau dapat dibilang bahwa jumlah masyarakat yang hidup menengah ke atas tidak sebanding dengan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sangat muskil jika kekuatan militer dan pemilik modal diabaikan begitu saja. Barangkali hal yang demikian itulah menjadi kalkulasi perhitungan Gus Dur untuk memenangkan Pemilu dengan jalan memulai kembali membangun keharmonisan dengan militer (Wiranto).

Kecuali bila kesadaran masyarakat sudah tinggi disertai pendidikan yang memadai tentu untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis berbasiskan masyarakat sipil mudah dilakukan. Dengan sendirinya kekuatan fisik (militer) bukanlah menjadi perhitungan utama, sebagaimana di Amerika Serikat militer tidak begitu berperan aktif di parlemen. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang sudah mulai ada kemajuan untuk mengurangi kekuatan militer di parlemen. Meskipun demikian kekuatan militer masih perlu diperhitungkan, jika tidak dapatlah

terjadi seperti apa yang dialami Gus Dur. Memang untuk menuju pemerintahan yang demokratis, masyarakat sipillah yang perannya lebih dominan. Sedangkan militer hanya sebagai kekuatan saja untuk mempertahankan negara dari gangguan luar maupun dalam. Dan kekuatan militer tidak begitu dominan terlibat dalam mengambil kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, dengan strategi tertentu secara bertahap rupanya dari pengalaman yang menimpa Gus Dur kekuatan militer harus digiring sedemikian rapi. Dan perlu strategi untuk menuju pemerintahan yang demokratis berbasis masyarakat sipil. Sehingga dalam mewujudkan impian tersebut tidak terulang, tidak jatuh untuk kedua kalinya. Yakni jangan sampai generasi berikutnya maupun dirinya mengalami peristiwa yang tragis dilengserkan dari kursi kepresidenan. **

RADAR SURABAYA, Jumat, 20 Februari 2005

Di Balik Kunjungan Megawati

Rencananya, Sabtu (14/2) hari ini Megawati mengunjungi kediaman Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi di Pondok Pesantren Al-Hikam di Jalan Cengger Ayam Malang (RADAR Surabaya, 12/2/2004). Setidaknya kunjungan itu dapat dinilai sebagai upaya kunjungan politis (political journey). Dapat ditengarai bahwa kehadiran Megawati menjelang Pemilu ini dimungkinkan ada upaya mencari perhatian untuk menarik simpatisan kaum Nahdliyin yang basisnya ada di Jawa Timur. Ini merupakan strategi bagi tokoh PDIP sebagai langkah untuk memenangkan Pemilu tahun ini.

Tidak dapat dipungkiri, meski Megawati secara diplomatis akan menyangkal bila dianggap bahwa kunjungannya itu bukan bermaksud untuk tujuan politis. Paling tidak dalam kunjungan itu terkandung maksud-maksud tertentu (*mind of certain*) yang tidak mungkin diungkapkan ke permukaan.

Begitu juga rencana Megawati melakukan pertemuan dengan 40 Kiai Jatim di kediaman Cak Hasyim ini yang diperkirakan sambil meletakkan batu pertama proyek pembangunan GOR Ken Arok Kedungkandang. Dapat dimafhumi bahwa pertemuan itu menyiratkan sesuatu maksud, bisa jadi – biarlah dirinya – tidak dianggap sebagai sosok yang berseberangan dengan tokoh-tokoh Islam yang telah mempunyai umat mayoritas di Indonesia. Sebagai kuncinya ia perlu mendekat kepada para ulama. Khususnya Hasyim Muzadi yang merupakan tokoh panutan bagi ormas terbesar di negeri ini.

Dalam kunjungan kali ini, boleh jadi kegiatan itu sebagai agenda lanjutan dari kunjungan Taufik Kiemas beberapa waktu lalu pada November 2003. Apakah benar-benar sebagai lanjutan agenda Taufik Kiemas atau tidak, yang jelas Megawati berkunjung ke PP Al-Hikam itu memungkinkan ada kemauan Megawati

hendak melamar KH Hasyim Muzadi untuk dijadikan pendampingnya sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2004.

Terlepas dari maksud Megawati tersebut, kedatangannya juga dikemas dalam acara seminar “Membaca Peta Koalisi Pemilu 2004” yang kebetulan berbarengan dengan acara tersebut. Ini dapat diperkirakan bahwa dalam Pemilu April 2004, mau tidak mau seluruh komponen parpol harus bersiap-siap diri untuk memenangkan Pemilu. Dalam hal ini Megawati tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan kebetulan parpolnya juga diundang dalam seminar itu yang menghadirkan 4 tokoh parpol besar di antaranya dari PAN, PKB, PDIP, dan Partai Golkar.

Saat ini memang dirasakan bagi para parpol, terutama bagi tokoh PDIP ini untuk bargaining position di antara parpol yang lain jika ingin memperebutkan kursi utama RI. Tentunya untuk dapat meraih duduk di kursi RI 1 ini di antara parpol perlu tenaga ekstra, perlu berkoalisi dengan kubu mana yang tepat agar dapat diraihinya. Dari sini dapat dicermati bahwa Megawati punya strategi jitu guna menarik massa sebanyak-banyaknya dalam memenangkan Pemilu. Kemampuan inilah kiranya yang perlu diuji oleh Megawati, apakah mampu memperebutkan keduakalinya kursi yang saat ini sedang dalam genggamannya.

Dalam kancah memperoleh perhatian massa (*draw attention of the masses*), tentunya yang tidak boleh dilupakan di negeri ini yang masih dominan dengan kecenderungan memilih sosok pemimpin – fanatik kepemimpinan – umumnya yang diidolakan adalah dilihat dari segi ketokohan figur yang “kharismatik” – atau juga didasarkan atas pendahulunya – sebagaimana Megawati, masyarakat pendukungnya barangkali memilihnya lebih disebabkan atas jasa-jasa Soekarno . Inilah fenomena yang terjadi dimasyarakat, tidak melihat apakah seorang tokoh tersebut benar-benar mampu jadi seorang pemimpin atau tidak. Meskipun kapabilitasnya diragukan bukanlah menjadi masalah dan penghalang untuk tampil ke depan di tengah-tengah publik. Meminjam istilah Emile Durkheim yang melukiskan bahwa masyarakat tradisional mempunyai solidaritas mekanis. Karena ia muncul dari tingkah laku dan sentimen yang dipaksakan oleh sesuatu hukum yang represif.

Pendapat Durkheim ini setidaknya dapat dijadikan kajian untuk melihat masyarakat pemilih di negeri ini yang cenderung sentimen. Jadi, lebih mengedepankan emosional dibandingkan memakai logika. Pemahaman inilah kiranya dapat dijadikan pelajaran politik bagi masyarakat, agar tidak condong untuk memilih pemimpin-pemimpin yang tidak memperjuangkan hak-hak rakyat. Ada opini publik yang mengatakan dengan melihat kinerja pemerintahan di bawah kendali Megawati yang masih setengah hati menjulukinya dia adalah sebagai anak biologis. Dia kurang mencerminkan sikap Soekarnoisme.

Dari perkembangan suhu politik yang makin memanas menjelang pemilu, situasi seperti inilah yang dimainkan Megawati dalam lawatannya ke Malang. Kesempatan ini tidak bisa disia-siakan oleh Megawati dalam agenda utamanya bagaimana dapat memposisikan dirinya menjadi orang nomor satu untuk kedua kalinya di negeri ini. Peta perpolitikan telah dipermainkannya, ia mencoba bargaining dengan Hasyim Muzadi. Apakah tawar menawar dengan tokoh PBNU yang merupakan tokoh kharismatik yang kredibilitas dan kapabilitasnya tidak diragukan itu membuahkan hasil atau tidak? Namun terlepas dari itu, diterima atau tidaknya lamaran Megawati oleh Hasyim, setidaknya Megawati saat ini sudah dapat poin bagi partainya. Dia telah melangkah ke depan mencari terobosan-terobosan baru bagi dirinya untuk mencari alternatif lain jika Hasyim Muzadi menolak.

Meskipun lawatan kali ini tidak dimaksudkan untuk melamar Hasyim Muzadi misalnya, tetapi di balik itu Megawati telah mengubah opini publik. Yakni yang mengesankan bahwa dirinya agar dapat dinilai oleh publik sebagai tokoh yang sejalan dengan tokoh-tokoh Islam. Hal ini dapat dimaksudkan sebagai strategi untuk menarik simpatisan yang mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Terutama kunci yang perlu dipegangi oleh Megawati utamanya yaitu dengan menggandeng motor penggerak ormas terbesar negeri ini, visi yang diperankan perlu disinergikan dalam upaya approach kepada warga Nahdliyin. Dan yang tidak kalah pentingnya Megawati dapat membaca peta politik bagaimana cara menjaring warga Nahdliyin yang basis utamanya berada di Jawa Timur. Itu dilakukan agar suara mereka

ditujukan kepada partai politik yang dipimpinnya dalam rangka meraih jabatan kursi kepresidenan. **

RADAR SURABAYA, Sabtu, 14 Februari 2004

Hijrah Menuju Refleksi Kebebasan Yang Bermoral

Peristiwa hijrah, merupakan momentum lahirnya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Hal ini ditandai dengan bertemunya dua golongan besar umat Islam. Muhajirin dan Anshor yang telah berperan dengan baik di panggung sejarah dengan dibimbing oleh Rasulullah SAW, serta berdasarkan skenario Al-Qur'an dan Sunnah.

Meskipun mereka berbeda asal daerah, tapi tetap satu aqidah Islamiah. Kendatipun mereka berlainan adat dan tradisi namun tetap seiman dan sekeyakinan, yang terpatri utuh dalam sepasang kalimah tauhid dan tertuang dalam syahadatain.

Kemajemukan tidak membuat mereka, antara kaum Muhajirin dan Anshar berpecah belah. Mereka telah bisa menunjukkan hidup berdampingan dan rukun dengan orang-orang non Islam (Yahudi dan Nasrani) karena mereka menghayati dalam prinsip Islam semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketaqwaannya.

Jadi berbeda agama dan keyakinan bukan penghalang untuk menjalin ukhuwah, sesama hamba Allah. Walau kemudian kaum Yahudi mengkhianatinya. Dari dulu hingga sekarang bangsa Yahudi selalu mengkhianati konsensus bersama, sehingga sampai kini Timur Tengah selalu bergolak.

Sebagai konsekuensinya agar manusia dapat menjaga konsensus bersama, setidaknya patut merenungi asal muasal mereka berada. Sesungguhnya ketika manusia itu lahir ke dunia ini tidak membawa bekal apapun. Ia mulanya di alam gua garba ibu, kemudian beralih ke alam dunia fana dapat melihat bintang gemerlap beraneka warna dan dapat melihat berbagai keruwetan dan kesibukan hidup yang beraneka ragam. Filosofi dari *term* kehidupan di alam kandungan ibu kemudian meninggalkan alam tersebut dan menginjakkan kaki ke dunia kiranya dapat dikatakan sebagai bentuk *hijrah* meskipun dalam pengertian histori "hijrah"

dimaksudkan dengan perjalanan Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

Pengertian “hijrah’ secara histori jika dikaitkan dengan makna kontekstualnya dapatlah kiranya identik dengan pengertian seorang bayi yang lahir ke dunia ini untuk meninggalkan alam kandungan, meninggalkan keterkekangan dari gerak bebas, sebab manusia membutuhkan kebebasan. Dan memang penanggalan Islam tidak merujuk pada kelahiran Nabi Muhammad, tetapi pada kepindahan beliau dari Makkatul Mukarromah ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi kemudian menuju Madinatul Munawwaroh untuk berdakwah secara tegas dan terang-terangan, sebab situasi sudah memungkinkan, yaitu karena pada waktu itu sudah ditetapkan “Piagam Madinah” atau sering disebut “Konstitusi Madinah”, yakni adanya perjanjian antara umat Islam dan non Muslim untuk saling hidup berdampingan dan saling menghargai.

Begitu pula konteks kehidupan saat ini, berbagai macam konstalasi wacana pergulatan persaingan hidup, apakah dalam bidang politik, ekonomi, seni dan budaya berimplikasi pada pertarungan personality – perang batin – di dalam setiap individu manusia abad ini. Persaingan hidup ini juga merambah ke berbagai kawasan termasuk persaingan semisal pasca perang teluk. Amerika dengan segala kekuatan militernya ingin meluluh lantahkan negeri 1001 malam pimpinan Saddam Hussain. Suatu fenomena yang paradoks, kini hangat menjadi pertarungan, persekongkolan dan perseturuan antara Goergo Bush dengan Saddam.

Persaingan semacam itu menunjukkan bahwa dalam diri setiap individu terdapat suatu musuh yang disebut dengan nafsu. Senantiasa menentang segala bentuk kejujuran dan keadilan memasung rohaniah yang suci. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha tetapi Yusuf dapat mengalahkan hawa nafsunya. Disebutkan dalam Alqur’an :“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. 12 ; 53).

Keterkungkungan hidup membuat manusia tak berdaya, tetapi dengan ketidak berdayaan itu membuat semakin teguh dan getol melawan segala penindasan. Tidak berlebihan jika Irak melawan segala ketertindasan yang selama ini diberlakukan Amerika untuk mengenyampingkan terhadap segala policy yang diberlakukannya. Kini negeri Paman Sam itu telah menjadi perlawanan oleh berbagai negara, termasuk PBB juga tidak memberikan ijin kepada Amerika untuk menyerang Irak.

Berbagai elemen masyarakat mengutuk rencana serangan Amerika Serikat. Mereka berdemo memenuhi jalanan sejumlah kota-kota besar di berbagai negara, mulai dari Australia, London, Berlin, Paris sampai ke New York tercatat saat itu yang berpawai lebih dari sebelas juta penduduk dunia.

Refleksi pembebasan inilah sepatutnya dapat ditangkap untuk memaknai “hijrah” sebagai pembebasan dari segala keterkungkungan dan penindasan apakah penindasan yang dilakukan oleh imperialis Barat terhadap bangsa Arab maupun bangsa Asia kini dialami Indonesia. Adanya teroris yang belakangan menimpa negeri ini, mengakibatkan Indonesia jadi acak-acakan oleh Amerika Serikat, ada unsur intervensi yang pada intinya menyudutkan Indonesia agar berpihak kepadanya. Penjustifikasian segala kebijakan-kebijakan USA ini memang sangat bertolak belakang dengan semangat reformasi dan demokratisasi.

Oleh karena itu makna dari “hijrah” yang dapat dikemukakan lebih mendalam lagi yaitu, kepindahan – pembebasan – dari keterkungkungan sifat-sifat iri, dengki, hasut dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. agar anak Adam tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Karena jika ia menetap dengan sifat-sifat syaitoniah, sifat kemungkaran yang bersarang di dalamnya berarti ia dapat dikatakan masih belum berhijrah, belum pindah ke sifat-sifat terpuji yang diridhloi Allah, padahal hijrah itu adalah secara substansi agar manusia berpindah – terbebas – dari segala bentuk penindasan.

Kebebasan yang dimaksudkan bukan berarti kebebasan lepas kontrol, tanpa mengindahkan norma-norma hukum, tetapi kebebasan yang diinginkan adalah kebebasan yang memiliki moral. Moralitas yang baik, kokoh dan konsisten hanya akan

muncul dari pribadi yang senantiasa merasakan kehadiran Allah bersamanya, untuk menuntun hati nurani dan nalurinya.

Agaknya, memang itulah misi dan tujuan utama kehadiran Al-Qur'an dan Nabi besar Muhammad SAW, dalam sabdanya "Aku diutus semata-mata hanya untuk mewujudkan pribadi yang berakhlak mulia lagi paripurna".

Kiranya pribadi-pribadi yang bermoralitas Qur'an sedemikian rupa, sangat dibutuhkan untuk mensukseskan pembangunan bangsa dan negara, yang tercinta ini. Mampukah kita mengaktualisasikan potensi kekuatan etik dan moral Qur'an ini untuk mengarahkan, lebih mensukseskan dan mengamankan pembangunan? Sekaligus membuktikan bahwa diri ini adalah *Khoiru Ummah* dan *Rahmatan Lil'alamin*?

Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini, tentu bukan saja yang paling berkepentingan terhadap hasil pembangunan, melainkan juga yang harus paling bertanggung jawab atas kebenaran arah, aman, dan suksesnya pembangunan.

Pembangunan suatu bangsa dan negara tidaklah mungkin akan sukses, tanpa adanya pelaku-pelaku pembangunan yang bermoral terpuji dan handal. Kiranya benarlah kata ahli hikmah "eksistensi suatu umat/bangsa semata-mata tergantung kepada eksistensi akhlak dan moralnya. Bila moral mereka bejat, maka pastilah bangsa itu juga akan binasa". Sebagai konsekuensinya umat ini perlu berhijrah, yakni "meninggalkan" sifat-sifat yang tak bermoral. Untuk segera mengadakan gerakan untuk memahami dan kembali kepada Al-Qur'an, untuk dijadikan anutan dan acuan dalam rangka mewujudkan negeri yang *Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghafur*.**

RADAR SURABAYA, Senin, 3 Maret 2003

Isra' Mi'raj Cermin Moralitas

Peristiwa historis religius bila dikaji secara dalam banyak hikmah yang terkandung didalamnya yang dapat dipetik, yakni guna membangkitkan kembali semangat jihad Islam untuk menghadapi tantangan jaman. Adanya peristiwa Isra' Mi'raj adalah merupakan cerminan bagi umat manusia, yang mana manusia adalah sebagai makhluk yang selalu mencari makna.

Dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu, Rasulullah memperoleh pengalaman yang paling tinggi dan sempurna dalam kehidupan kerohaniannya. Peristiwa itu merupakan mu'jizat yang besar dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa yang mengungguli segala kehebatan yang ada pada umat-Nya. Sebagaimana yang telah kita saksikan di era kemajuan ini, teknologi dan sains modern semakin canggih, perjalanan dari Indonesia ke luar negeri hanya dapat ditempuh dengan kecepatan dan dalam waktu beberapa saat atau jam. Maka Rasulullah, Nabi Muhammad SAW di Isra' Mi'raj-kan, menempuh perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsha lalu sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian, kembali lagi ke Masjidil Haram hanya butuh waktu tidak sampai setengah malam.

Tetapi orang-orang Quraisy waktu itu banyak yang tidak mempercayai peristiwa tersebut. Bahkan mengejek Rasulullah SAW, dan menganggapnya gila. Sebab secara logika, jika ditempuh dengan berjalan kaki atau naik onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha saja memerlukan waktu berhari-hari.

Perjalanan Isra' Mi'raj ini jika direnungkan lebih dalam, akan mendorong orang yang mau berpikir rasional dan mau belajar. Terutama di era kemajuan teknologi modern yang ada sekarang ini mendorong umat manusia berlomba-lomba ingin menakhlukkan angkasa luar, dari Bulan, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus sampai kepada Pluto, Venus dan Mercurius. Bahkan ingin menjangkau galaksi-galaksi yang lain. Tetapi perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad telah sampai kepada Sidratul

Muntaha yang letaknya jauh lebih tinggi dari semua galaksi yang ada.

Kepandaian manusia diantara makhluk-makhluk yang lain inilah membuat manusia dapat menakhlukkan dan menjelajahi ruang angkasa. Sehubungan dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini, maka jika dikaji lebih jauh tidaklah salah bahwa Allah SWT menciptakan manusia ini sebagai khalifah, yakni untuk membangun dan memakmurkan bumi Allah yang telah dipercayakan sepenuhnya ini (QS. Al-Baqarah : 30). Untuk membangun dan memakmurkan tersebut sangat diperlukan adanya ilmu dan pengetahuan yang cukup sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad sebagai Pemimpin Besar Pembangunan Dunia, khususnya dalam mental spiritual, segera di Isra' Mi'rajkan untuk mendapat pedoman dan dasar-dasar kepemimpinan yang Hakim.

Sesungguhnya untuk menjadi manusia pembangunan, kiranya tidak cukup hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, tanpa adanya jiwa yang besar, bertaqwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Tahu. Oleh karena itu dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi diberikan oleh-oleh untuk seluruh umat, yaitu berupa shalat lima waktu yang harus dijalankan setiap hari lima kali, yang membawa kesucian bagi diri dan kehidupan umat manusia.

Dapat dimaknai bahwa dari perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi, diperoleh dua hal kebutuhan yang sangat penting bagi umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan mulia. Pertama yaitu ilmu pengetahuan yang tinggi. Dapat dicontohkan sebagaimana Nabi Sulaiman As, sewaktu disuruh memilih oleh Allah antara harta dan ilmu, maka beliau memilih ilmu. Akhirnya dengan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman As, akhirnya beliau memperoleh segalanya. Beliau mempunyai permadani yang bisa terbang dalam waktu sekejap. Selain itu Nabi Sulaiman mengerti bahasa seluruh binatang, juga beliau dapat memerintah jin dan binatang serta makhluk lainnya.

Itulah anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman As yang kebetulan beliau banyak menguasai ilmu pengetahuan. Begitu pula Nabi Muhammad, beliau juga menganjurkan agar umatnya senantiasa menuntut ilmu sebagaimana sabdanya, "Carilah ilmu

dari gendongan ibu sampai ke liang lahat (kubur)”. Dengan ilmu orang bisa mengetahui segala sesuatu, seperti peristiwa tahun 1978 orang Amerika Serikat yakni Neil Amstrong dan Buss Aldrin telah berhasil mendarat di Bulan dengan menggunakan pesawat Apollo 11. Untuk itulah mencapai kehidupan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu.

Kedua adalah sholat lima waktu, hal ini dimaksudkan agar manusia selalu ingat akan Allah SWT yang menjadikannya, supaya tidak sombong dan congkak. Sesungguhnya semua ilmu yang dikuasai manusia itu adalah milik Allah, Tuhan Semesta Alam yang menguasai Jagad Raya dan isinya. Ilmu manusia sesungguhnya adalah ilmu Allah yang diantara masing-masing manusia dianugerahi dari sebagian kecil ilmu Allah. **

RADAR SURABAYA, Rabu, 24 September 2003

Antara kekejaman dan Ketidakadilan Kanibalisme Ala-Sumanto

Pemberitaan yang dilansir oleh beberapa mass media baik cetak maupun elektronik tentang kanibalisme, rasanya membuat diri kita bergidik dan agak terusik. Dunia ini terasa semakin aneh saja, perihal penangkapan Sumanto (31) warga Purbalingga Jawa Tengah yang saat ini masyarakat telah dibuat geger. Penyebabnya ia diduga kuat telah memakan daging manusia (Duta Masyarakat, 17/1/2003).

Kejadian seperti itu tidak hanya dilakukan oleh Sumanto saja. Peristiwa manusia makan manusia (*kanibalisme*) tampaknya menjadi hal yang sudah sering terdengar di telinga kita. Setelah kanibalisme di Jerman (sepasang gay makan alat vitalnya sendiri), kasus serupa terjadi pula di Kongo. Jean Pierre Bemba pemimpin Gerakan Pembebasan Kongo (MLC) mengaku sangat terkejut dengan adanya laporan kanibalisme tersebut. Tim PBB menemukan sebagian tentara MLC terlibat kekejaman di Kongo bagian utara yang dikuasai MLC dengan ditemukannya bukti-bukti kanibalisme, pemerkosaan, pembunuhan, dan penyiksaan. Sedangkan di belahan dunia lain, warga Ukraina, Mykola Tsivashov (42) memakan seorang gadis di bawah umur. Tsivashov memasak bagian-bagian tubuh anak tersebut dan memakannya dengan tanpa rasa jijik atau bersalah. Selesai makan kemudian membuangnya ke sampah. Dan beberapa hari kemudian polisi menangkapnya, selanjutnya dia dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Appellate, di timur wilayah Donetsk Ukraina (Surabaya News, 18/1/2003).

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa kanibalisme seperti dilakukan Sumanto, menurut pengakuannya ketika ditangkap polisi mengatakan sedang menjalani *lelaku* ilmu kebatinan (*black magic*), ia mengakui terus terang yang mencuri mayat Ny. Rinah (80) dari pekuburan umum desa Srengseng sekaligus telah memakannya. Kanibalisme ala-Sumanto itu dapat ditengarai ada beberapa gejala, sebab kalau melihat latar belakang

dia, ada kemungkinan penyebabnya *frustasi*-ketidakpuasan-dalam hidup ini yang bisa diakibatkan beberapa faktor salah satunya ekonomi, dengan semakin membungunya kebutuhan hidup sehari-hari sehingga ia berlaku aneh dengan alasan melakukan *black magic*.

Demikian halnya, yang dilakukan oleh tentara MLC di Kongo, tidak menutup kemungkinan ada indikasi ke arah ketidakpuasan dalam hidup dan juga yang dilakukan Mykola Tsivashov dari Ukraina. Ketidak puasan itu menyebabkan mereka melakukan kanibalisme, secara tidak terkontrol mereka berbuat semaunya. Padahal menurut pandangan umum hal itu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh manusia yang normal (*waras*).

Ketidak puasan masyarakat seperti dialami Sumanto dengan dalih sedang 'nglakoni' ilmu tertentu atas perintah gurunya ini ada indikasi bahwa ada suatu keinginan mengadakan suatu perubahan apakah dalam bentuk *-idiologi*-sebagai manifestasi terhadap perubahan sosial hidup karena merasa tertindas dengan kehidupan yang makin menjepit ini dan merasakan adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Dapat pula ada indikasi ingin membuat jiwanya menjadi kuat/tega terhadap kondisi yang sedang dihadapinya. Dan bisa pula ingin melahirkan suatu pertentangan/kejutan di tengah-tengah masyarakat-secara psikologis- agar ada perhatian dari orang-orang sekelilingnya. Semua indikasi tersebut lepas dari "gangguan kejiwaan", gejala-gejala tersebut dapat dialami dan menimpa masyarakat.

Meminjam istilah Maslow (1993:65) berkaitan dengan psikologi "Tingkat Kepastian Hierarki Kebutuhan Pokok", ia mengatakan bahwa "hierarki" bukan merupakan satu tertib yang tetap, dan tidak sekaku yang tersirat. Lebih lanjut Maslow menjelaskan bahwa pasti akan diperoleh kesan yang salah bila hanya memandang perilaku semata. Orang menghendaki kebutuhan yang lebih utama dari dua kebutuhan pokok, apabila ia terenggut dari kedua-duanya. Di situ tidak tersirat keharusan bertindak sesuai keinginannya.

Mungkin dalam menyikapi kanibalisme ala-Sumanto ini kita perlu melihat kebutuhan-kebutuhan pokok Sumanto. Dua kemungkinan kebutuhan utama Sumanto ialah pertama, keinginan mengangkat taraf hidupnya. Kedua, ingin

menyelamatkan dirinya terhadap penindasan yang selama ini dia rasakan. Kedua kebutuhan tersebut mungkin belum terpenuhi bagi Sumanto, namun kedua kebutuhan itu ada yang lebih dipentingkan atau diutamakan yaitu menyelamatkan diri dari penindasan yang selama ini dirasakan. Sebab ia yakin dengan kekuatan fisik semata mungkin tidak mampu melawan penindasan orang-orang sekelilingnya. Maka, salah satu cara yang ditempuh walau dengan prasyarat sebagai kanibal untuk melakukan aksinya (*black magic*)-kekuatan metafisik-inilah yang ia anggap ampuh dapat menyelamatkan dirinya (*for self of safety*) dari penindasan yang makin hari bertambah keras.

Dengan argumen tersebut bukanlah berarti tindakan Sumanto itu dapat dibenarkan. Pernyataan Maslow, untuk menyikapi fenomena ini setidaknya mengandung dua pengertian. *Pertama*, jika seseorang menghendaki dua kebutuhan pokok, sedang dua kebutuhannya itu hendak terenggut, maka ia akan memilih yang lebih diutamakan. *Kedua*, dalam situasi yang demikian, tidak ada keharusan bertindak sesuai keinginannya. Dalam hal ini barangkali keinginan Sumanto seharusnya tidak menjadi kanibal, tapi apa boleh buat situasi yang demikian membuatnya mau tak mau bertindak menyalahi keinginannya. Sebenarnya sikap demikian dapat dihindari dan masih banyak jalan yang lebih kompromis dan manusiawi. Sehingga tidak terjerumus pada sikap-sikap yang akan dapat mengorbankan segalanya untuk mencapai ideal atau nilai tertentu, yang mana nilai-nilai itu orang akan bersedia menjadi martir.

Kanibalisme ala-Sumanto termasuk cukup disayangkan dan memprihatinkan, kemungkinan hanya beberapa orang saja yang dijadikan sasaran. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah bagaimana dengan "*warok-warok kanibalisme*" yang tidak hanya manusia yang mereka makan. Lebih dari itu mereka tidak manusiawi lagi, mereka memakan apa saja yang kelihatan kasat mata. Ada manusia dimakan manusia, ada uang dimakan uang, ada hutan dimakan hutan, ada batu dimakan batu, ada Indosat dimakan Indosat, ada BBM dimakan BBM, ada listrik dimakan listrik- (semua itu merupakan metafora saja)- ada kesan rakyat dijadikan mangsa oleh "*warok-warok kanibal*" ketika mereka mempunyai kesempatan.

Perilaku-perilaku penyimpangan dan pelanggaran terhadap norma masyarakat seperti itu, menunjukkan bahwa nilai-nilai humanisme di panggung dunia ini mengalami reduksi. Bagaimana tidak, jika para penguasa apakah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatnya bila menjadi tiranik yang kejam, maka suatu ketika bom waktu akan meledak, sebagaimana fenomena yang muncul belakangan ini. Seperti USA dengan keadikuasaannya menjadi kanibalisme bagi rakyat Irak pada tahun 90-an dan rencananya akan terulang kembali. Sejarah juga mencatat diperkirakan 60 juta orang telah menjadi korban akibat penerapan komunisme di Uni Sovyet termasuk suatu pembunuhan yang luar biasa pada saat itu. Pembunuhan orang-orang Yahudi oleh Nazi Jerman sebanyak 6 juta orang. Menurut *Handbook of Current Affairs* yang diterbitkan tahun 1954 menyatakan bahwa hampir 38 juta muslim telah dilenyapkan dalam waktu 10 tahun sebelum proklamasi RRC yang komunis pada tahun 1944.

Kalau mau jujur dan mengoreksi diri tentulah kanibalisme yang dilakukan penguasa negeri ini, pejabat dan konglomerat yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak hanya memakan manusia, tapi juga merampas dan memakan hak-hak jutaan orang.**

DUTA MASYARAKAT, Senin, 27 Januari 2003

Menjaga Netralitas Badan Intelijen Negara

Tinggal beberapa hari lagi masa kampanye akan berlangsung tepatnya tanggal 11 Maret-1 April 2004. Tidak ketinggalan di antara para pejabat negara yang juga merangkap sebagai fungsionaris partai politik juga mulai pasang kuda-kuda. Mereka ikut berlaga menjadi juru kampanye (jurkam) di parpolnya yang telah mengantarkannya menjadi orang penting di jajaran pemerintah.

Berbeda dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang tidak larut niatnya untuk ikut-ikutan menjadi jurkam seperti pejabat negara yang lain. Kepada Media Indonesia ia menyatakan tidak bersedia menjadi jurkamnas PDIP. Meskipun saat ini ia masih tercatat menjadi anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) di parpol pimpinan Megawati (Radar Surabaya,06/03/2004).

Sebagai aparat di bidang intelijen (alat negara) Hendropriyono memang seharusnya netral. Tidak memihak kepada partai politik manapun, termasuk membuat jarak dengan PDIP sebagai parpol yang ikut membesarkan namanya. Ia patut dipuji, penolakannya menjadi jurkam mencerminkan sosok kebangsawanan. Sebagai warga negara yang baik dan mempunyai posisi yang strategis ia tidak ingin menciptakan kecemburuan sosial di masyarakat. Apalagi posisi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, tentu sangat naif dan kontradiktif dengan amanat rakyat (bangsa). Sebagai pejabat negara, apalagi pimpinan tentu tugas utamanya harus mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan dan memberi contoh yang baik kepada bawahannya. Karena posisi Kepala BIN jika ditinjau dari fungsinya setidaknya hampir dapat disamakan dengan kedudukan Kapolri dan Panglima TNI. Maka sudah sepatutnya jika dia bersikap netral. Sehingga kepentingan negara tidak terkalahkan oleh kepentingan sesaat kelompoknya.

Apabila netralitas pejabat negara ini dijaga tentu akan membawa dampak yang baik, sebagai alat negara seharusnya bersifat independen. Tidak boleh dipakai (dimanfaatkan) oleh kelompok manapun. Termasuk oleh kelompok partai yang sedang berkuasa, yakni PDIP. Dengan demikian konflik kepentingan (*conflict of interest*) setidaknya dapat dieliminir. Dengan begitu maka dapat memilah-milah dan membedakan kedudukannya, mana tugas sebagai pelayan masyarakat yang harus mengutamakan kepentingan orang banyak (masyarakat) dan mana tugas sebagai fungsionaris parpol yang harus dikesampingkan terlebih dahulu. Jika tugas kedudukan dua kepentingan itu dicampur-baur maka sudah dapat dipastikan salah satu kepentingan akan terabaikan. Apalagi kalau sampai kepentingan bangsa itu terkalahkan, sungguh sangat ironis. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Umpamanya bila Kepala BIN Hendropriyono terbukti menjadi jurkam PDIP tentu kedudukan utamanya sebagai alat negara. Disadari atau tidak tugas utamanya sebagai pelayan dan pengaman masyarakat bisa jadi terabaikan. Ia sudah termasuk terjebak kedalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) masuk perangkat kepentingan parpolnya, yakni PDIP. Sedangkan kepentingan yang lebih besar dan lebih utama untuk kepentingan negara akan dapat terkalahkan. Dan ironisnya sikap seperti itu hanya mementingkan ambisi kelompok tertentu saja.

Padahal kalau diperhatikan dalam pelaksanaan kampanye sangat rentan terhadap adanya keributan dan kerusuhan massal. Apalagi kedudukan Hendropriyono sebagai Kepala BIN, tugas utamanya untuk memberikan pengawasan dan menjaga stabilitas keamanan negeri. Apakah berbagai masalah yang ada sangkut-pautnya dengan suatu kelompok atau golongan yang ingin merongrong kedudukan negara atau yang ingin membuat keonaran di negeri ini. Bahkan juga mengawasi gerak-gerik suatu kelompok yang bertujuan menciptakan suasana yang tidak kondusif hanya untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan sesaat. Tidak ubahnya dengan pelaksanaan kampanye, jika posisinya saat ini sebagai orang yang seharusnya netral, lalu tiba-tiba jadi jurkam suatu parpol, tentu tujuan utamanya hanya sesaat. Hanya demi memperoleh simpatisan sebanyak-banyaknya untuk

memenangkan pemilu. Hal ini sudah termasuk terjebak dalam kepentingan sesaat untuk kepentingan kelompok tertentu saja, yakni PDIP. Sedangkan untuk kepentingan yang lebih utama, yakni kepentingan keamanan negeri akan dapat terabaikan.

Berangkat dari pengalaman atau peristiwa yang lalu itulah, setidaknya dalam pelaksanaan kampanye memang rawan terjadi kerusuhan. Dengan sengaja atau tidak dalam pelaksanaan tersebut ada saja pihak-pihak tertentu yang memang dengan sengaja atau tidak memanfaatkan momen-momen itu untuk kepentingan tertentu. Baik menyangkut kepentingan ekonomis atau politis yang mungkin saja bertujuan saling membenturkan antar massa pendukung parpol tertentu sehingga terjadi keributan. Tetapi di balik itu semua bermuara pada saling menjatuhkan citra masing-masing parpol yang saling berseteru. Mungkin juga ada agenda tertentu menciptakan suasana *chaos* di dalam negeri untuk mengeruk keuntungan dengan suasana yang demikian.

Mengingat situasi pelaksanaan kampanye rawan terhadap konflik itulah maka pekerjaan institusi BIN secara logis tentunya lebih diarahkan untuk memantau pelaksanaan kampanye di sejumlah daerah di tanah air yang volumenya cukup padat. Ditambah lagi banyaknya parpol, maka logis jika perhatian BIN untuk sementara diarahkan ke sana. Memantau pelaksanaan kampanye 24 parpol yang akan berlaga dalam pemilu yang merupakan gawe besar bagi bangsa ini untuk dapat menghasilkan para pemimpin yang mau memperdulikan rakyat. Dan tidak terjebak ke dalam kepentingan sesaat yang justru dapat memunculkan konflik. Padahal peran sesungguhnya harus mengelaminir konflik dan menciptakan suasana kedamaian.

Kebijakan Hendropriyono sebagai Kepala BIN itu sepatutnya diacungi jempol. Meski saat ini ia tercatat duduk di dalam Majelis Pertimbangan PDIP, tetapi ia dengan pertimbangan yang arif menolak sebagai jurkamnas PDIP. Dapat dipahami bahwa dengan dasar pemikiran yang demikian tentunya sebagai alat negara ia harus netral. Sebagai pejabat negara ia sebenarnya juga punya hak yang sama dengan menteri-menteri yang juga menjadi jurkam untuk parpolnya masing-masing. Tetapi Hendropriyono yang namanya saat ini masuk dalam daftar nama jurkamnas PDIP yang diserahkan ke KPU itu juga punya hak untuk menolaknya jadi

jurkamnas. Tidak terjerumus ikut-ikutan ambil bagian seperti pejabat lainnya. Ia punya prinsip lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan negara untuk menciptakan suasana tenang di masyarakat dibanding kepentingan sesaat yang tidak tertutup dapat melahirkan konflik. Semua itu tidak lain agar pemilu kali ini menjadi sukses. Semoga.

**

RADAR SURABAYA, Senin, 8 Maret 2004

Menuju *Self Awareness* Dalam Berfitri: Fitrah Insaniyah

Setiap hati manusia atau nurani insaniyah senantiasa cenderung kepada kebenaran, kebaikan serta mendambakan hidup tenang, tentram dan bahagia. Tidak akan ada naluri manusia yang membenarkan tindakan yang salah, perbuatan yang merusak dan perilaku yang menyimpang (*destroyed of behavior*), serta keinginan untuk hidup sengsara.

Naluri itu adalah fitrah (*true principle*) yang alami (*sense of natural*) yang diberi oleh Allah untuk semua manusia. Tuhan tidak membedakan saat memberi fitrah kepada setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia. Apakah dari golongan Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi, dan golongan lainnya. Maha Adil Tuhan, semua itu diberi kedudukan yang sama dalam setiap hati manusia. Namun kala menjelang dewasa (akil baliq) sebagaimana ketentuan hukum fiqih, beban dosa yang diperbuat oleh setiap orang akan ditanggung sendiri-sendiri, seseorang mulai mengerti (sudah dapat dianggap menentukan mana barang baik dan buruk, haq dan batil), mulai dari situ dalam dirinya sering terjadi kontroversial dalam menentukan sikapnya. Di antara fitrah (kesucian) dan hawa nafsu (cenderung kepada keburukan) berupaya untuk saling berlomba, saling mengalahkan, menjegal, mengganjal berebut untuk jadi pemenangnya.

Berangkat dari fenomena antara fitrah dan hawa nafsu inilah, senantiasa membawa manusia dapat mencapai derajat makin tinggi (bahkan dapat melebihi derajat malaikat) atau bahkan membawa manusia itu ke derajat makin rendah *asfala safilin* (bahkan lebih rendah dari derajat hewani). Menyadari hal itu, tinggal pilih yang mana terbaik untuk manusia lakukan dan dijadikan pedoman dalam hidupnya. Memilih cenderung fitrah tentu ada balasannya, begitu juga sebaliknya ada ancaman tersendiri pula.

Namun mengapa fitrah manusia itu seringkali terkalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Bukankah ia sebenarnya mengerti

bahwa perbuatannya itu termasuk melanggar atau menyalahi norma-norma yang ada, tapi mengapa dilakukannya. Dan sebenarnya ia tahu apa kompensasinya atau akibatnya setelah berbuat salah (namun ada pula kesalahan yang memang tidak disengaja), di situlah kelemahan manusia.

Keadaan fitrah manusia ini kalau kita coba kaitkan dengan menyoroti terjadinya tragedi pertempuran antara Amerika Serikat melawan Afghanistan, hal ini termasuk suatu kasus perang syaraf antara nurani dan hawa nafsu. Sebagaimana dilansir surat kabar bahwa Amerika telah mengakui punya bukti dalam sebuah rekaman video yang menghubungkan Osama bin Laden pada serangan teror 11 September di Amerika Serikat, seperti dilaporkan Washington Post hari Minggu (9/12) mengutip pejabat-pejabat senior pemerintah USA (Kompas, 10 Desember 2001). Di samping itu pemerintah Amerika menuduh Bin Laden sebagai dalang serangan teror itu, tetapi belum mengeluarkan bukti yang memperlihatkan bahwa dia secara langsung merencanakan atau memerintahkan mereka.

Adanya pengakuan temuan rekaman video tadi, tuduhan USA tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi publik penjuror dunia, seakan dunia internasional diminta meng ACC dan mempercayai terhadap pengakuan atas kebenaran pemerintah Amerika Serikat. Semua telah mafhum, sebab negara Super Power jaringannya terlampau luas, di mana berita-berita miring selalu dicondongkan demi menguntungkan negeri Paman Sam itu sendiri.

Negara Adi Kuasa ini pandai memutarbalikkan opini publik, sehingga mereka yang kurang cerdas tentu akan menerima berita seperti apa adanya. Masalahnya kalau dipikir lebih lanjut apakah di balik itu semua tidak adakah sesuatu niat tersembunyi bagi kepentingan Amerika ingin menghancurkan negeri-negeri Islam yang terlalu berani dan tidak mau tunduk terhadapnya akan berhadapan dengannya serta akan dibinasakan. Tapi di balik itu semua bisakah Amerika membinasakan ruh-ruh kebenaran (*inner self*) dalam setiap pribadi orang.

Meskipun Amerika Serikat dapat membumi hanguskan seluruh negeri Afghanistan, tapi ruh-ruh kebenaran kebenaran (*inner self*) di negeri itu tidak akan mudah dihancurkan begitu saja.

Suatu ketika ruh-ruh kebenaran ini pasti akan muncul dan kembali menyusun kekuatan untuk melawan segala bentuk penindasan tidak berperikemanusiaan. Ruh-ruh kebenaran (*inner self*)- tidak pandang bulu orang manapun, baik orang Amerika sendiri tentulah pada saatnya mengatakan tentang pembenaran dan meyalahkan tindakan pemerintahannya (meskipun banyak rintangan dan hambatan yang akan ditemui jika tidak mendukung pemerintahannya) tentu akan menjustifikasikan bahwa kebenaran (fitrah) manusia akan mengakui adanya, dan terasa sulit mengingkarinya (walaupun kadang gengsi terhadap ruh-ruh kebenaran/fitrah atas riak-riak yang disandangnya) dalam setiap masing-masing individu.

Seperti diberitakan, meskipun Osama bin Laden sebagaimana pengakuan pemerintah Amerika menemukan video rekamannya, bahwa Osama terlibat dalam pembicaraan mengenai otak penghancuran gedung WTC dan Pentagon, namun dapat dipertanggung jawabkan video rekaman yang ditemukan Amerika. Setiap orang tentu mempunyai pandangan berbeda. Begitu pula gembar-gembar Amerika menemukan rekaman Osama bin Laden seperti dilansir berbagai media.

Hal itu tidak lain agar publik mempercayai terhadap temuan Amerika tersebut dan bisa dijadikan suatu pedoman atau pegangan bahwa Osama telah bersalah, menjadi tertuduh dan harus mempertanggung jawabkannya. Tapi sepicik itukah pandangan umum? Bagi orang yang bijak akan mengalami katarsis, terharu dengan tragedi yang menimpa rakyat Afghanistan mengalami penderitaan akibat bombardir serangan pasukan Amerika Serikat.

Negara Adikuasa itu bisa saja menemukan rekaman Osama bin Laden (jika kebenarannya memang valid). Tapi bisa pula hal itu merupakan rekayasa saja bagi Amerika (di mana Amerika membuat rekaman seaneh mungkin dan sevalid mungkin yang sesungguhnya tidak valid) dibuatlah rekaman dengan aktor dan suaranya mirip Osama bin Laden dibalut dengan berbagai teknologi super canggih sehingga seakan-akan bahwa rekaman itu pelakunya benar-benar Osama. Dan seakan-akan tuduhan Amerika terhadap Osama itu benar sehingga publik percaya terhadap berita yang dilansir sumbernya dari Amerika itu

(meskipun tidak semua orang akan mempercayai hegemoni tersebut).

Bisa pula ada dugaan karena gengsi Amerika terhadap dunia internasional sebab sudah meluluhlantahkan Afghanistan bila tuduhannya terhadap negara yang dituduh melindungi seorang teroris, ternyata tuduhannya salah maka habislah muka negara Adi Kuasa di dunia internasional. Oleh karena itu negara Adi Kuasa ini dengan segala upayanya bagaimana tuduhannya itu bisa benar, dan diakui di seluruh dunia (walau itu merupakan kerja dan rekayasa politik saja dengan dibalut berbagai argumen yang kelihatannya valid, yang mana sesungguhnya tidak valid dan hanya permainan Amerika saja) untuk menutupi gengsi mereka (dan pengakuan dari temuan video rekaman oleh Amerika perlu diuji kembali kevalidannya, apakah sepihak atau bagaimana?).

Nampaknya para pemimpin Barat saat ini berupaya menghegemoni terhadap negara-negara Islam, sebagaimana ungkapan Gus Dur usai tampil sebagai pembicara utama pada pertemuan regional untuk Asia Pasific (*Ist Asia Pacific Regional Assembly*) di Kuta Bali, Jumat (14/12). Dalam kesempatan itu Gus Dur mengatakan, "Yang melakukan hegemoni itu adalah pemimpin-pemimpin Barat, bukan rakyat Barat. Sebaliknya mereka malah banyak yang berdemonstrasi menentang pemerintahan mereka. Kita harus mengerti itu". Gus Dur juga mencontohkan tentang laporan CIA kepada Presiden George Bush untuk membom Irak lagi. Namun keinginan itu ditolak oleh Senat Amerika. "Nah, penolakan itulah yang mewakili rakyat," papar GusDur, dan ia menyerukan supaya negara-negara Islam mengutuk terorisme dan sikap hegemoni negara-negara besar. "Merka (negara-negara Barat) tidak bisa main gebuk seenaknya secara sepihak," tandas Gus Dur (Duta Masyarakat, 15 Desember 2001). Dari sikap demonstrasi rakyat Barat terhadap pemerintahnya, menunjukkan bahwa masih ada fitrah dalam diri orang-orang Barat, dan hal ini sulit dibendung karena hal itu merupakan karunia Ilahi yang semua orang telah mendapatkannya.

Berawal dari sikap gengsi, ingin menjadi Super Power, negara nomor wahid, ingin berkuasa sendiri, menang sendiri, pintar

sendiri, pokoknya tidak ingin ada orang lain yang dapat menandingi, inilah merupakan bibit penyakit atau sumber bencana sehingga fitrah manusia sering tertutupi menjadikan nafsu hewaniahnya yang lebih menonjol. Sikap demikian cenderung dalam melakukan segala tindakannya senantiasa represif, cenderung menghalalkan segala cara, apakah tindakannya itu menyalahi aturan atau tidak, terpenting bagi mereka tujuannya dapat tercapai, meskipun tindakannya merugikan orang lain. Siapa yang menghalangi terhadap tujuannya, tidak segan-segan akan disikat.

Kecenderungan-kecenderungan nafsu hewaniah inilah membuat manusia terkadang hilang kendali (*loss of controlling*). Sampai-sampai dapat menuhankan hawa nafsunya (ilah kepada nafsu) sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqaan ayat 42,43: *"Terangkanlah kepadaKu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)."*

Begitulah kecondongan nafsu hewaniah mendorong manusia akhirnya dapat menjerumuskannya ke *asfala safilin*. Sifat-sifat manusia yang cenderung diliputi nafsu hewaniah, telah banyak menjangkiti manusia di abad ini sebagaimana pendapat Abdul Rahim (Kuliah Tawhid, 1999:62) Alihatun atau Tuhan-Tuhan yang populer (menuhankan banyak Tuhan selain Allah/membuat Tuhan tandingan). Seperti halnya harta atau duit dijadikan sebagai ilah, karena ternyata memang duit ini termasuk "ilah" yang paling berkuasa di dunia ini.

Di kalangan orang Barat mengatakan *"The Almighty Dollar"* (Dollar yang maha kuasa). Begitu pula ada juga bagi mereka tahta dijadikan sebagai ilah (Tuhan tandingan), sebab pangkat atau tahta erat sekali hubungannya dengan duit. Tidaklah salah jika Presiden marcos dan istrinya Imelda, umpamanya menjadi kaya raya akibat kedudukannya, mereka bersikeras terus menerus mempertahankan kedudukannya walaupun rakyat menyatakan ketidasesenangan mereka kepadanya. Demikian juga kasus baru-baru ini yang kita dengar lewat berbagai media kasus seorang

Ketua DPC salah satu partai menyatakan pada masyarakat Surabaya dan Jatim “Kalau pengen kaya jadilah politikus” yang akhirnya oleh Ketua Umum dan sekjennya tidak segan-segan mengeluarkan SK pembebastugasan dan pemecatan dari keanggotaan partai dan fraksi di DPRD Surabaya dikarenakan (masalah moral) sebab pernyataannya dianggap melukai masyarakat dan termasuk merusak citra partai (Bangsa, 8 Des 2001).

Kiranya demikianlah akibatnya jika manusia telah dirasuki nafsu hewaniah, dengan berbagai cara segala macam tindakan akan ditempuhnya, meskipun akan melukai dirinya, ia tak akan peduli terhadap semua yang hendak menyimpannya.

Untuk mengembalikan kepada jati dirinya semula, maka manusia harus kembali kepada asal muasalnya (ingat asal-usulnya) atau pada jaman bahuleunya. Di mana ia perlu menyadari bahwa ia tercipta dari sesuatu barang yang sebelumnya tidak berharga sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Mukminun ayat 12-16. Kemudian sebagaimana diterangkan dalam surat Ar-Ruum ayat 30: *“Hendaknya manusia menghadapkan wajahnya dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”* Sebab setelah manusia terlahir kedunia dan bersinggungan dengan lingkungannya, banyaklah dipengaruhi atau tergoda kenikmatan-kenikmatan duniawi sifatnya sementara yang sesungguhnya tidak mengekalkan, sehingga seringkali lupa terhadap kehidupan yang kekal. Dan padahal dunia ini tak lain hanyalah suatu permainan, atau suatu sendau gurau.

Maka selamat dan berbahagialah bagi mereka yang selalu mengingat akan keberadaan fitrahnya, dengan tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menggoda atau menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan. Tidak mudah terpengaruh dengan kenikmatan-kenikmatan sementara yang pada akhirnya dapat mencelakakannya. Dengan begitu tentulah akan kembali manusia itu ke fitrahnya semula yaitu asalnya tidak punya dosa dan noda seperti halnya bayi yang baru lahir.

Di situlah letak fitrah manusia, berangkat dari hal itu dalam rangka merayakan Idul Fitri yang mana selama satu bulan penuh kita telah digembleng dengan adanya puasa yang merupakan “Batu Ujian Ketaatan manusia kepada Allah SWT. Sebab dengan berpuasa membuat suatu kristalisasi di antara mereka yang mengaku dirinya beriman dan Muslim. Kristalisasi tulen asli bukanlah yang imitasi, maka untuk memenuhi Hari Raya Idul Fitri terbiasa orang saling bermaafan dengan berucap “*Minal ‘Aidien Wal Faidzien*”.

Dengan momentum ini kita pergunakan saling menyadari kesalahan masing-masing pribadi (*self awareness*), masing-masing pihak untuk saling memaafkan menuju kesucian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan perdamaian abadi. Bukan malah sebaliknya saling menghujat, bermusuhan, dan bertempur.**

DUTA MASYARAKAT, Rabu, 19 Desember 2001

Pejabat Berkampanye dan Ambisi Kekuasaan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang dibahas secara voting dalam Sidang Paripurna DPR pada 18 Februari 2003 banyak dikeluhkan berbagai pihak. Salah satunya, pasal 75 tentang boleh tidaknya pejabat publik berkampanye. Meskipun pada akhirnya telah disahkan menjadi Undang-Undang Pemilu, namun berbuntut polemik.

Ada yang menilai produk UU tersebut hanyalah suatu permainan akrobatik partai-partai besar yang mempunyai kader di pemerintahan pusat maupun daerah. Dan diprediksikan pasal tersebut akan banyak dilanggar oleh Pejabat Negara.

Disahkannya pasal 75 menjadi Undang-Undang itu yang mengatur mengenai diperbolehkannya Pejabat Negara berkampanye, mempunyai indikasi bahwa ada pengaruh yang besar mendominasi di partai yang kini berkuasa, PDIP dan PPP. Yang mana Ketua Umum PDIP Megawati yang saat ini menduduki kursi RI I dan Ketua Umum PPP Hamzah Haz sebagai Wapres jelas-jelas seakan punya harapan besar memenangkan Pemilu 2004. Dan ini sangat merugikan parpol yang lain, seakan hak-hak mereka diabaikan, tidak bisa menyuarakan kebenaran.

Jika kalkulasi untung-rugi agar dapat meraih kekuasaan yang mendominasi dalam individu, menjadi pertimbangan dalam voting yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di DPR, pada saat mengambil keputusan, masihkah mereka punya hati nurani. Setidaknya memutuskan mengambil suatu sikap hendaknya didasarkan pada kemaslahatan umat, demi kebaikan rakyat. Bukan hanya kemenangan yang dijadikan taruhan. Lebih dari itu, pertimbangan kemanusiaan (*humanistis*), solidaritas sosial mendengar suara-suara *wong cilik* sepertinya tidak tersentuh. Katakanlah, suara partai-partai kecil jika itu benar dan bagus selayaknya bisa dijadikan acuan mengambil suatu kebijakan dan keputusan.

Mungkin dapat dibenarkan pendapat Ketua Umum Partai Politik Islam Indonesia (PPII) Masyumi Abdullah Hehamaua, mengomentari bahwa UU Pemilu ini adalah terjelek yang pernah dimiliki Indonesia untuk melaksanakan pemilu. Kritik ini mempunyai argumen dapat dicontohkan dengan pelaksanaan Pemilu 1999. Pelaksanaan Pemilu saat itu menggunakan Sistem Proporsional Tertutup dengan daftar Calon Legislatif (caleg) terpilih berdasarkan rangking. Tetapi untuk Pemilu 2004 dengan UU Pemilu yang baru, penentuan caleg terpilih diselenggarakan sepenuhnya kepada DPP partai. Artinya DPP perlu diberikan otoritas yang lebih tinggi. Ketentuan ini akan cenderung menimbulkan konflik horisontal di masyarakat (RS, 22/2/03).

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam Pemilu mendatang telah menunjukkan sikap diskriminasif. Meminjam istilah Muhammad Asfar (JP, 22/2/03) tidak sedikit pasal yang mendistorsi, baik terhadap semangat sistem proporsional terbuka, pelaksanaan Pemilu 2004, maupun amandemen UUD 1945. Termasuk juga dalam hal ini pasal yang membolehkan Pejabat Negara berkampanye.

Meskipun dalam pasal 75 itu ada tiga ketentuan pejabat negara boleh berkampanye, antara lain tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan pengaturan lama cuti serta jadwal cuti memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara. Akan tetapi ketiga ketentuan aturan main itu adakah jaminan yang mengatur bila pejabat itu melanggar? Meskipun ada aturannya, biasanya seorang pejabat yang melanggar senantiasa Undang-Undang yang berlaku dikalahkan oleh kekuasaannya, tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuatnya.

Sebagian pihak menyoroti sangat tajam soal Pejabat Negara yang akan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pemilu 2004 mendatang, lagi-lagi hal itu membikin Hamzah Haz gerah juga. Ia menyatakan siap berkampanye tanpa fasilitas negara. Bahkan, siap melepaskan protokoler, seperti pengawalan, jika dirinya ditugaskan berkampanye oleh partainya.

Jika dicermati banyak kalangan maupun elemen masyarakat tidak yakin pejabat negara itu akan bisa melepaskan keterikatannya dengan jabatan yang disandangnya. Bagaimana

mungkin seorang Presiden akan kampanye ke suatu daerah tanpa pengawalan. Bahkan, di daerah tempat kampanye tidaklah mungkin seorang Gubernur atau Bupati atau Pejabat bawahan lainnya akan membiarkan begitu saja kehadiran seorang Presiden.

Faktor sosio-psikologis antara atasan dan bawahan inilah yang kerap jadi ganjalan birokrasi negeri ini, susah dihilangkan. Susah membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan birokrasi. Umumnya di kalangan birokrasi yang kental dengan kultur Asal Bapak Senang (ABS) model-model Orba inilah yang saat ini masih melekat dalam jajaran birokrat negeri ini.

Pada umumnya kampanye diprinsipkan oleh elite politik untuk memenangkan pemilu, arah tujuannya hanya jangka pendek. Banyak tidak dipahami jangka menengah dan jangka panjangnya. Dan yang lebih penting lagi yaitu substansi dari tujuan berkampanye itu sendiri. Kebanyakan kampanye yang sudah-sudah hanya mengobral janji-janji saja. Setelah memenangkan Pemilu berbalik mengkhianatinya, tujuan utamanya ingin berkuasa. Ambisi "keberkuasaan" inilah motif yang mendominasi pribadi-pribadi politikus. Sedang ambisi kerakyatan hampir sama sekali tidak disentuhnya, sehingga suara-suara rakyat kerap kali mendapat sumbatan. Jika rakyat sudah tidak kuat lagi menerima beban yang berat ini. Mungkin saja terjadi perubahan secara revolusioner, namun bisa juga evolusioner. Itu semua bergantung bagaimana rakyat negeri ini diperlakukan oleh siapapun penguasa rezim yang memimpinya.

**

RADAR SURABAYA, Selasa, 4 Maret 2003

Sekali Lagi, soal Goyang Inulisme

Seni merupakan daya kreasi, cipta rasa, dan karsa, pemikiran-fantasi-manusia. Tak ubahnya kreasi yang ditampilkan oleh Inul Daratista, sosok dara asal Gempol Pasuruan Jawa Timur. Dipanggung-panggung pertunjukan dangdut sering mendapatkan sorotan, ada yang menyukai dan ada yang antipati. Menciptakan suatu kreasi yang diinofatif tidaklah mudah. Tetapi berbicara, mencemooh sangatlah gampang, sebab lidah memang tak bertulang.

Goyangan yang meliak-liuk, fulgar, seperti banyak ditonton orang tentunya menguras banyak energi. Pola tersebut merupakan bagian dari ekspresi – rasa ungkapan – yang ada dalam diri seseorang. Tidaklah berlebihan manakala Inul, sebagaimana penyanyi terkenal lainnya turut berkiprah mengekspresikan potensi yang ada didalam dirinya (*expression for in self*).

Ia mempunyai hak untuk mengomunikasikan dengan penggemarnya, meskipun melalui jalur dangdut, dengan penampilan – okonge – sebutan penggemar Suroboyoan dan ia sendiri terbiasa dengan fans yang demikian itu, tidak menyurutkan nyali Inul sebagai salah satu cara yang dirasa efektif untuk bersosialisasi dengan masyarakat.

Dunia panggung rasanya sulit terlepas dari kehidupan Inul. Pro-kontra yang ditimpakan kepadanya justru membuat namanya semakin dikenal orang. Dangdut mania belakangan dibuat geger, berbagai respon menganggap bahwa goyangan Inul terlalu seronok, erotis, fulgar, sampai-sampai dijuluki Ratu Goyang sehingga membuai bola mata kaum adam terbelalak keasyikan menyaksikan goyangannya. Dampaknya di masyarakat – terutama kaum hawa ibu-ibu membenci dan memprotes penampilan Inul. Ada semacam kecemburuan sosial, menganggap penampilan Inul hanya mengumbar syahwat, dapat mengalihkan perhatian para suami condong dan gandrung terhadap goyangan Inul. Sehingga dapat menyurutkan kasih sayang (*Love and affection*) terhadap istri dan keluarga.

Terhadap mereka yang menolak dengan kehadiran Inul ada beberapa alibi yang dapat diketengahkan. Pertama, kecenderungan Inul menampilkan keerotisan – kemolekan goyang pantatnya – dapat mengumbar fantasi seksual melalui goyangan erotisnya, dan ini kurang sesuai dengan budaya ketimuran.

Kedua, dengan terhipnotisnya mania dangdut – masyarakat secara umum – kegandrungan terhadap penampilan Inul dapat berakibat pada – *negative thinking* – berpola pikir ke fantasi-fantasi seksual, apalagi jika hal ini dicerna oleh anak-anak yang belum waktunya. Ada kekhawatiran dampak negatifnya lebih besar dari pada positifnya.

Ketiga, tampilnya dimuka umum dengan goyangan erotisnya dan merebaknya VCD Inul bak kacang goreng laris manis terjual di pasaran, dikhawatirkan bisa menjadi bius sehingga dapat melupakan aktifitas hidup yang sesungguhnya, bukan malah sebaliknya yang hanya diliputi fantasi belaka.

Terlepaas dari ketiga alibi tersebut, baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta juga mengeluarkan fatwa tentang peringatan dan pembinaan terhadap Inul. Tidak terlupakan Inul pun juga menjadi incaran oleh Dirjen Pajak sebagai kompensasi untuk pajak penghasilan, yang mana penghasilan Inul tiap bulan diperkirakan tidak kurang dari 700 juta (Surabaya News 13/2/03). Cukup fantastis memang penghasilannya. Sampai-sampai ia kebanjiran job, sempat menolak berbagai undangan. Bidikan terhadap Inul juga tidak kalah sengitnya dilontarkan oleh sebagian artis yang mungkin merasa tersaingi kepopulerannya sehingga ada penilaian terhadapnya.

Penampilan Inul Daratista yang punya nama asli Ainur Rokhima, yang saat ini terus melejit namanya dibelantika musik dangdut mania andai tidak keberatan bolehlah dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap artis-artis Ibu Kota yang selama ini mendominasi di dunia tarik suara. Dan sempat meneggelamkan penyanyi-penyanyi daerah yang dirasakan sulit untuk menembus ke pasaran.

Terjadinya kesenjangan antara penyanyi pusat (Ibu Kota) dan daerah inilah mengakibatkan artis-artis daerah menjadi suram. Enggan untuk berkisah dan mengembangkan

profesionalisme keartisannya di dunia tarik suara. Untuk tampil ke permukaan yang lebih mendunia seakan sempit dan terjepit.

Banyak kendala dan disorot kampung. Padahal kalau mau jujur, penyanyi-penyanyi daerah yang berbakat bila dibandingkan dengan artis Ibu Kota belum tentu akan kalah dalam penampilan suara, dan (*performance*). Barangkali penampilan Inul – berbagai cara yang ditempuhnya – walaupun resiko mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat, tapi ia sudah membuktikan bahwa penyanyi kampung tidaklah selalu kampung.

Selama ini memang belum ada pembinaan yang intens untuk menampung figur artis daerah yang berbakat. Kalau di Surabaya ada wadah pemilihan Cak dan Ning, di daerah-daerah ada wadah pemilihan Gus dan Yuk. Tapi untuk menampung penyanyi berbakat dan profesional yang ada di daerah masih belum ada yang memfasilitasi dan mewadahi secara terstruktur dan terorganisir.

Kehadiran Inul di belantika dangdut mania tidaklah berlebihan dapat dianggap sebagai protes. Realita dapat dirasakan bahwa penyanyi (biduan) kampung kerap dikucilkan dan kurang mendapat tempat yang prestise dan terhormat. Namun, fenomena itu tentunya bagi Inul yang terlahir dari rakyat biasa (wong cilik) sebenarnya juga mempunyai kekuatan dan potensi untuk melawan segala ketertindasan oleh penguasa negeri ini maupun oleh kalangan yang biasa hidup glamour dan bergelimang harta sebagaimana kehidupan selebritis, seakan mereka tak punya kepedulian terhadap rakyat yang makin tertindas untuk bisa hidup di negeri yang katanya, “gemah ripah loh jinawe”.

Lain halnya dengan Harry Roesli yang menggugat sebutan itu dengan menyebutnya pemerintahan RI sebagai Republik Banjir. Dan sebagai bantahan terhadap kritik yang kerap menyudutkan Inul dapat ditanggapi dengan beberapa argumen, kenapa rakyat yang miskin ini tidak bergoyang ketika ketegakan hukum bergoyang-goyang. Sebenarnya rakyat tidak pernah digoyang untuk diberi tahu bahwa mereka jadi miskin karena hak mereka dikorupsi oleh para koruptor.

Rakyat juga tidak digoyangkan akal sehatnya bahwa damai itu bukan nrimo, dan kritis itu bukan anti damai, bahkan kritis itu bukan anarkis!

Ada sebuah sorotan, menurut seorang petinggi hukum, korupsi itu sulit untuk dibuktikan. Nah, bila seorang petinggi hukum saja sudah pesimistis untuk bergoyang, sewajarnya rakyat tidak bergoyang kendati kehidupan mereka sudah digoyang-goyang, bahkan dapat dikatakan mirip dengan goyangan Mbak Inul.

Mungkin malah goyang Mbak Inul ini adalah refleksi dan gambaran kondisi Republik negeri ini. Semua bergoyang-goyang tidak ada yang ajeg. Bahkan goyang Inul yang cepat itu persis seperti goyangan harga-harga barang. Ada masalah sedikit, kontan dengan cepatnya harga-harga bergoyang.

Bahkan, sejarah republik ini adalah goyangan. Orde lama digoyang Orde Baru, dan Orde baru digoyang Orde Lama tapi baru, lalu Orde Lama tapi baru ini digoyang Orde Baru tapi lama, dan mungkin Orde Baru tapi lama ini akan digoyang lagi oleh Orde Lama yang tidak baru-baru amat. Dan kenyataannya hidup saat ini, selaksa masih hidup di zaman Ken Arok, dan ini goyangan tidak rasional.

Seiring dengan fenomena yang menjadi sorotan publik tidak jarang penampilan Inul mendapat kritikan dan cemoohan dari berbagai elemen masyarakat. Apakah dari para artis yang sudah tenar maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat. Seorang kolumnis Madiun pernah mengomentari "bahwa yang dijual Inul bukan suara dan lagunya, tapi goyangan pinggulnya".

Masih menurut kolumnis tersebut, ia mengomentari, "musik dangdut yang berestetika tinggi tanpa embel-embel goyang berlebihan pun bisa laku kerap di pasaran seperti album Evi Tamala atau Ida Laila". Terlepas dari itu semua, memang ada yang sinis, ambivalen dan menyukai penampilan Inul yang lagi booming.

Sosok Inul – Inulisme – saat ini memang lagi ngetrend dan lagi naik daun. Tidak sedikit Inul-inul yang lain mendompleng meniru goyang ala - Inul Daratista. Meskipun Inul sendiri mengecam terhadap mereka yang hanya ikut-ikutan, berpenampilan jorok dan seronok melebihi penampilannya.

Hanya mengumbar nafsu sawat dan tidak mempunyai kreatifitas seni.

Terhadap berbagai kritikan dan sorotan apakah yang antipati maupun yang pro terhadap penampilan Inul, diakui atau saat ini memang Inul lagi mencapai puncaknya. Banyak mendapatkan orde, yang dikontrak oleh beberapa stasiun televisi, ada yang mengajak dijadikan model iklan sampai undangan diskusi.

Demikianlah kenyataannya, untuk menyiasati pro kontra terhadap Inulisme ini diperlukan suatu wadah dan fasilitator. Mampu menjembatani, memberikan pembinaan dan bimbingan. Memberi kesempatan kepada Inul-Inul yang lain untuk tampil lebih *perfectable*, dapat tampil dipermukaan layaknya penyanyi-penyanyi yang sudah mengorbit dan tidak hanya memberangus kreatifitas orang lain.

Memang, kini rasanya sudah sulit membayangkan Inul tanpa goyangannya. Meminta Inul menghentikan goyang erotisnya rasanya akan sama dengan meminta Rendra di masa produktifnya dulu tidak menulis sajak-sajak pamfletisnya.

Inul datang menjual goyangannya. Dan pasar menerima goyangan itu sebagai sebuah terobosan baru dalam dunia showbiz. Di sini yang berlaku adalah mekanisme pasar. Dan di dalam pasar, faktor nilai yang bisa saja kita sebut ke-Timuran, atau ke-Baratan, nyaris tak ada artinya. Jadi ada pasar ada goyangan.

Erotisme Inul nyatanya memang sangat laris diminati. Pasar merespon dengan sangat cepat “produk baru” goyang Inul yang sama sekali lain dengan yang pernah ada. Inul memang melahirkan genre baru dalam goyang dangdut, bila dulu kita mengenal ada goyang gaya Elvi Sukaesih, Fety Fera, dan masih banyak lagi penyanyi dangdut lainnya, maka kini adalah masanya Inul.

Namun, ada yang membedakan Inul dengan mereka yang lain, yakni goyangannya yang dianggap sangat erotis dan nyaris masuk ke level yang menurut penilaian penyanyi dangdut lain, “menjijikkan.” Bisa jadi itu hanya perwujudan rasa cemburu karena lahirnya pesaing baru.

Tapi, itulah Inul. Di saat banyak penyanyi, baik asing maupun lokal tampil semakin berani, kenapa Inul jadi masalah. Kenapa

Shakira baik-baik saja? Britney Spears diterima dengan lapang dada, begitu juga dengan gaya Nafa Urbach yang oleh banyak kalangan dinilai seronok itu?

Inul, agaknya memang cermin jamannya. Inul tidak lahir di ruang hampa. Inul lahir di tengah masyarakat yang nilai-nilainya juga mulai bergeser. Jadi kenapa harus risau? Begitu mungkin kata penggemar fanatiknya. Benarkah?

Semua itu tidak akan terjadi kontradiktif, terpulang bagaimana peran masyarakat agar kreatifitas orang lain tidak terbelenggu, begitu pula dengan Inul-Inul yang lain diharapkan dapat tampil lebih modis dan *perfectable* sesuai dengan norma-norma masyarakat adat ketimuran. Tidak hanya mengandalkan tampang dan mengedepankan nafsu-nafsu belaka, yang dapat memancing kontradiktif publik. **

RADAR SURABAYA, Selasa, 18 Februari 2003

Mencermati Pernyataan Taufik Kiemas

Pencalonan Gubernur Jatim sebagai calon tunggal yang dilontarkan Taufik Kiemas selaku tokoh fungsionaris pusat PDIP yang juga suami Presiden Megawati baru-baru ini santer diberitakan media massa. Imam Utomo yang dijagokan sebagai tokoh tunggal oleh Kiemas untuk menjadi gubernur yang akan kedua kalinya itu mengindikasikan penutup pintu bagi kader PDIP yang lain untuk bisa tampil dalam bursa pencalonan gubernur Jatim.

Sikap bulat Megawati memilih Imam Utomo itu telah diungkapkan Taufik di sela-sela ramah tamah yang dimoderatori CEO Jawa Pos, Dahlan Iskan di Graha Pena Selasa (13/5/03). Di balik pernyataan Kiemas itu menyiratkan sesuatu hal yang patut dicermati. Kesan yang nampak ke permukaan menunjukkan bahwa PDIP benar-benar mendukung pencalonan tunggal Imam Utomo untuk dijadikan sebagai gubernur Jatim yang kedua kali periode 2003-2008 mendatang. Pencalonan Imam Utomo sendiri dengan kesediaannya untuk dicalonkan oleh PDIP juga termasuk modal utama baginya untuk memperoleh kursi orang nomor satu di Jatim.

Dengan pernyataan Kiemas itu, apakah PDIP secara sungguh-sungguh mencalonkan Imam Utomo? Jika mengamati perkembangan yang ada selama ini, sepertinya Imam Utomo banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Meskipun PDIP tidak menjagokan dirinya sebagai calon tunggal umpamanya, tentu Imam tidak akan kalah bersaing dengan tokoh lain dari PDIP andaikan dari parpol tersebut ada yang dijagokan.

Bergaining bursa calon gubernur Jatim memang membutuhkan kekuatan dari berbagai pihak. Tentunya dari parpol yang ada saling tawar menawar untuk memenangkan jagonya yang telah dikader untuk mendapatkan kedudukan yang cukup prestise tersebut. Termasuk salah satu parpol dari PKB santer mencalonkan kadernya Syaifullah Yusuf, untuk duet

dengan Imam Utomo. Demikian juga dengan PDIP-Jatim telah mengajukan masing-masing nama untuk calon gubernur Jatim yaitu Imam Utomo dan Pujo Basuki yang juga Wakil Wali Kota Pasuruan.

Perkembangan selanjutnya, yaitu ada apakah di balik semua itu tiba-tiba Megawati akan menolak kadernya seandainya ada yang *ngebet* untuk mencalonkan jadi gubernur Jatim, sebagaimana diungkapkan Taufik Kiemas. Dari penolakan Megawati untuk melarang para kadernya dalam bursa pencalonan gubernur Jatim, hal itu dapat ditengarai bahwa sejak awal kalau dihitung-hitung besar kemungkinannya kader-kader dari PDIP akan kesulitan dan tidak akan mulus memenangkannya. Sebab dari survei yang ada di Jatim, untuk pemilihan Kepala Daerah saja (Bupati) tokoh dari PDIP sulit untuk mengegolkannya.

Dari kenyataan itulah mengapa PDIP tidak akan menjagokan kadernya. Justru dari pihak lain yang dijagokan sebagai tokoh tunggalnya yaitu Imam Utomo. Dengan strategi yang demikian Megawati mencoba benar-benar bernegosiasi untuk saling merapatkan barisan dengan Imam Utomo dan pendukung-pendukungnya agar dia lolos menjadi Gubernur Jatim 2003-2008. Jika Imam Utomo yang jadi orang nomor satu di Jatim kalkulasi strategi Megawati dan PDIP-nya berarti membuahkan hasil. Tetapi jika berbalik strategi Megawati dan PDIP-nya perlu dipertanyakan.

Diperkirakan bila Imam Utomo benar-benar jadi orang nomor satu di Jatim kembali, berarti strategi Megawati dan PDIP-nya yang dipakai sebagai alat untuk mendongkrak suara Pemilu 2004 akan berjalan mulus. Hal itu diperkirakan akan mampu meraup suara terbanyak di Jatim, dan itu tidak akan mempersulitkan perjalanannya, sebab orang nomor satunya di Jatim sudah digaitnya.

Lain halnya jika dari parpol lain seperti dari kader PKB yang jadi orang nomor satu di Jatim, bagi Megawati dan PDIP-nya itu merupakan batu sandungan bagi mereka untuk memuluskan dan mendongkrak suara PDIP di Jatim. Sebab Jatim basisnya *Nahdliyyin* yang *notabene* identik dengan PKB, inilah wacana yang dapat saja terjadi. Dan itu merupakan strategi yang dibaca Megawati dengan langkah-langkah permainannya. Strategi yang dipakai

Megawati dan PDIP-nya nampak cerdas sekali. Dan memang politik perlu kecerdikan untuk memperoleh suatu kemenangan. Mereka tidak ingin menguras energi terlalu banyak gara-gara mengejar (menjadikan seseorang jadi Gubernur) dari kader partainya tetapi yang diutamakan akan hilang kesempatannya. Yaitu dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar dan yang menjadi target utama lebih penting untuk duduk menjadi orang nomor satu di republik ini.

Di balik pernyataan Taufik Kiemas dengan menyitir gagasan yang telah diputuskan Megawati, yakni menjagokan Imam Utomo jadi calon tunggal tersebut secara implicit dapatlah ditangkap maknanya. Pertama, bahwa suara PDIP terutama di Jatim dalam Pemilu 2004 tidak ingin menjadi kalah telak dengan parpol-parpol lain. Makanya Imam Utomo digandeng sebagai teman PDIP untuk mendongkrak suara PDIP di Jatim oleh Megawati.

Kedua, PDIP tidak ingin *kecolongan*, terulang kembali kekecewaannya kedua kali dalam Pemilu 2004 sebagaimana tahun 1998 yang mana PDIP memperoleh suara terbanyak, tetapi yang jadi seorang Presiden bukan dari kalangannya (kadernya), justru sebaliknya dari parpol lain. Karena itu dalam pemilihan Presiden untuk Pemilu akan datang dengan memilih secara langsung. Dengan strategi itu, Megawati ingin dirinya dipilih kembali sebagai Presiden kedua kali.

Dia tidak ingin mengorbankan yang besar hanya dengan mempertahankan yang kecil untuk terlalu dipertahankan secara idealis, seperti pencalonan gubernur Jatim kali ini mengapa dari kadernya jika memang sulit untuk menang dan akan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu lebih baik berfokus kepada yang utama, biarlah orang lain yang dijadikan gubernur tapi dengan kompensasi Megawati dan PDIP-nya dapat meraih sesuatu yang lebih besar dan utama, yakni untuk menjadi RI-1. **

RADAR SURABAYA, Jumat, 16 Mei 2003

Kegagalan PDIP Soal Pilkada

Seiring akan punya gawe besar di Jatim, pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) untuk tahun 2003-2008 mendatang, PDIP sebagai partai pemenang Pemilu kedua di Jatim pada 1999 seakan merasa galau. PDIP tidak ingin kecolongan lagi jika ingin meraup suara terbanyak di Jatim dalam pemilu 2004. Berkaitan dengan Pemilu mendatang itulah mengapa buru-buru Megawati merestui Imam Utomo-Ali Maschan.

Kegagalan PDIP yang ditunjukkan Megawati dengan memilih kedua tokoh tersebut dapat diprediksikan untuk yang kedua kalinya, meski yang terakhir merestui Imam-Ali Maschan ini. Pekan lalu pun sudah ditandai lebih dahulu, telah merekomendasikan bahwa Imam Utomo telah dijadikan calon tunggal. Situasi yang demikian telah dibaca Megawati bahwa Imam Utomo walaupun tidak didukung PDIP pun memungkinkan lolos jadi Gubernur Jatim kedua kali. Mengantisipasi hal demikian, strategi Megawati yaitu menjagokan Imam jadi calon tunggal, dan ini sangat berkaitan dengan Pemilu 2004 mendatang agar suara PDIP di Jatim tidak jeblok. Kekhawatiran lain jika Gubernurnya dari PKB tentu suara PDIP 2004 diperkirakan akan semakin terpuruk.

Penjaringan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah diambang pintu inilah membuat PDIP pasang strategi. Bagaimanapun PDIP tidak menginginkan jika orang nomor satu di Jatim itu jatuh ke tangan orang-orang PKB. Sebab dikhawatirkan dalam meraup suara di Pemilu 2004 PDIP akan kalah telak. Dengan berbagai usaha seperti itulah PDIP berupaya selalu menjegal kader-kader PKB, entah bagaimanapun jalannya.

Terhadap penolakan Imam Utomo kepada Syaifullah Yusuf yang menurut PKB akan digandengkan itu, terdapat suatu logika bahwa Imam Utomo memang setia kepada PDIP dari pada PKB, dan mengharapkan dirinya agar dapat lolos sebagai satu-satunya calon tunggal untuk merontokkan calon-calon lain. Strategi Imam menolak Syaifullah adalah logika agar tidak

dianggap membelot oleh PDIP sebagai partai yang menjagokannya. Jika Imam membelot atau ada calon lain yang dekat dengan Imam atau yang dijagokan Imam sendiri, tentulah Imam tidak akan dipercaya lagi oleh PDIP, sebab strategi PDIP pun sudah matang, yaitu mengharap memenangkan Pemilu 2004 yang dimotori Imam Utomo.

Menurut Arbi Sanit dalam makalahnya yang disampaikan saat dialog interaktif Calon Pemimpin Jatim 2003-2008 dan polling pendapat di Hotel Shangrila Surabaya, Kamis (29/5) bahwa idealnya dalam pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) hendaknya PKB dan PDIP menjalin koalisi. Pernyataan Arbi ini dapat didasarkan bahwa apabila penentuan kepala daerah (Jatim) jika disandarkan atas sikap menang-menangan sesuai dengan solusi perseteruan politik, tidak menutup kemungkinan timbulnya disharmonis, ketidakstabilan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dan ini akan dapat menyengsarakan rakyat Jatim, selain itu juga akan dapat melahirkan politik *status quo* sebagaimana jaman Orba.

Dapat ditengarai, apabila pasangan kepala daerah yang didominasi oleh PDIP dengan calon Imam Utomo dan Soenarjo akan tetap menghasilkan pemerintahan yang elitis. Sebab pada realitanya masyarakat Jatim berbasis PKB dan PDIP. Jika kedua partai ini tidak ada kompromi, dikhawatirkan timbulnya kesenjangan yang cukup dalam, yakni masyarakat bagian timur (tapal kuda/PKB) dan barat (PDIP) terjadi gap, dan ini tidak menguntungkan bagi PDIP sendiri. **

DUTA MASYARAKAT, Senin, 2 Juni 2003

Peluang Duet Gus Dur-SBY Makin Terbuka

Bursa pencalonan Presiden dan wakil Presiden antara Gus Dur-Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mendekati kenyataan. Duet kedua tokoh itu setidaknya sudah diambang pintu, sebagaimana pernyataan Wakil Ketua DPP PKB Pusat Mahfud MD dalam kampanyenya di Sumenep. Menurut dia pencalonan SBY sebagai cawapres PKB merupakan satu alternatif yang mendapat dukungan dari pengurus PKB maupun Kiai Khos (Radar Surabaya,15/3).

Dapat diperkirakan jika duet Gus Dur-SBY menjadi kenyataan ada kemungkinan besar dalam pemilu putaran kedua pemilihan capres dan cawapres menjadi saingan berat bagi pemegang kekuasaan negeri ini (Megawati) pimpinan PDIP maupun Akbar Tandjung (Partai Golkar). Karena dari perkembangan politik yang berkembang saat ini kedua tokoh itu, yakni Gus Dur-SBY banyak disebut-sebut sebagai tokoh yang dapat mewakili dari berbagai kalangan. Gus Dur mewakili *grass root* (kalangan tradisional) dan SBY sebagai tokoh yang mewakili kalangan intelektual maupun militer yang masih diperhitungkan kekuatannya.

Semenjak SBY menyatakan di hadapan publik pengunduran dirinya dan tidak lagi bergabung dengan Kabinet Gotong Royong. Setidaknya ia sudah membuat kalkulasi untung-ruginya dengan melepas jabatan Menko Polkam. Sebab melihat perkembangan politik yang terjadi dalam pemerintahan di bawah kendali Megawati sebagai representasi PDIP tidak lagi merepresentasikan sebagai partai *wong cilik* sebagaimana yang pernah digembar-gemborkan. Dan juga tidak lagi menegakkan supremasi hukum yang menyebabkan tercerabutnya rasa keadilan buat rakyat sehingga masih banyak mendapatkan kecaman miring di hati publik. Wajar jika selama ini Megawati banyak disudutkan Mahasiswa. Tentu jika SBY terus bergabung dengan pemerintahan Megawati, baik langsung maupun tidak langsung akan terkena imbasnya mencitrakan ketidakberpihakannya terhadap rakyat.

Duetnya Gus Dur-SBY ini, setidaknya sudah ditandai dengan pertemuan kedua tokoh itu setelah pengunduran SBY dari kabinet Megawati. Yang mana pada siang harinya (11/3) setelah pengunduran dirinya dan malamnya ia langsung mengadakan pertemuan dengan Gus Dur. Dalam pertemuan itu minimal memungkinkan ada deal-deal politik (kesepakatan) dalam percaturan politik untuk memenangkan pemilu, terutama pemilu putaran kedua pemilihan capres dan cawapres. Dari pertemuan Gus Dur-SBY tersebut hingga apa yang dinyatakan Mahfud MD dalam kampanyenya, dengan merangkul SBY membuka peluang koalisi antara PKB yang diwakili Gus Dur dan Partai Demokrat yang diwakili SBY. Bergandengnya kedua tokoh itu setidaknya akan mampu mengangkat citra kedua partai tersebut.

Perkembangan akhir-akhir ini diberbagai polling, apakah melalui LSM, media massa cetak maupun elektronik memang SBY banyak mendapatkan suara yang cukup signifikan bila dibandingkan Megawati. Meskipun validitasnya masih diragukan, setidaknya wacana itu dapatlah dipakai sebagai gambaran buat melangkah baik Gus Dur maupun SBY untuk melangkah memperebutkan kursi kepresidenan. Dari gambaran itu tidaklah salah jika Gus Dur mau mencoba merangkul SBY. Sebab dengan melihat kalkulasi yang ada dapat diperkirakan jika koalisi kedua partai antara Partai Demokrat (sebagai partai baru dan kecil) dengan pengaruh SBY yang besar dan PKB sebagai partai yang sudah teruji kemampuannya dalam pemilu 1999 akan mampu memenangkan pemilu. Mungkin SBY juga membuat perhitungan, karena melihat kemampuan partai Demokrat yang akan menjagokannya itu sebagai partai baru dan kecil konstituennya maka saat ini ia juga harus membuat perhitungan bergandengan dengan partai besar lainnya yang cukup representatif, yakni PKB. Tidaklah salah dan *maton* (masuk akal) jika PKB koalisi dengan partai Demokrat yang punya jago cukup berpengaruh.

Dengan menggandeng SBY setidaknya PKB banyak mendapat keuntungan. Karena figur SBY dari opini yang berkembang di masyarakat, ia dapat merepresentasikan sebagai tokoh yang bisa bergaul di mana saja. Ia dipandang sebagai tokoh yang nasionalis, agamis, akademis yang tegas dan berwibawa. Menurut sebagian pengamat politik ia digolongkan sebagai intelektual yang

berseragam militer, pantaslah jika di kalangan kampus ia juga banyak mendapat dukungan. Dengan pandangannya yang brilliant itulah membuat ia disegani oleh kawan maupun lawan politiknya. Sehingga SBY sempat menjadi rebutan oleh partai-partai lain, seperti PNBK pimpinan Eros Djarot juga mengelus-elus SBY untuk dijagokan jadi capres.

Bahkan tokoh-tokoh PKB banyak memberikan dukungan terhadap duetnya Gus Dur-SBY sebagaimana dukungan Kiai Khos se-Indonesia ketika dalam acara silaturahmi di Pondok Pesantren Buntet milik KH Abdullah Abbas di Cirebon (9/3). Dari integritas seorang SBY itulah maka barangkali menjadi poin pertimbangan dikalangan tokoh ulama. Karena SBY dapat dinilai sebagai tokoh yang mampu merepresentasikan kesemua golongan. Di samping itu SBY juga dapat dikategorikan sebagai tokoh yang mewakili militer, karena menurut perkiraan militer untuk saat ini masih diperhitungkan dalam pemerintahan transisi. Kemungkinan SBY juga tahu diri bahwa posisi Presiden bukanlah menjadi target utamanya, sebab partai Demokrat yang menjagokannya bukanlah partai besar sehingga dimungkinkan perolehan suaranya kecil. Dan kemungkinannya kecil akan dapat mengantarkannya jadi presiden jika ia tidak berkoalisi dengan partai lain yang lebih besar. Ia tahu diri bila jadi wapres saja sudah untung, apalagi seorang presiden. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam pemilu putaran kedua pemilihan capres dan cawapres Gus Dur terganjal kesehatannya sehingga tidak lolos masuk dalam daftar capres dan cawapres. Alternatifnya Gus Dur mengajukan SBY jadi capres dari PKB dan didukung partai-partai lainnya seperti PNBK. Ini kemungkinan akan mampu mendulang suara terbanyak dalam pemilu nanti. **

RADAR SURABAYA, Kamis, 18 Maret 2004

Gerakan Mahasiswa Menentang Otoritarianisme Baru

Amanat reformasi yang diserukan mahasiswa sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 hingga kini yang dikomandoi oleh Mega-Hamzah kembali menunjukkan sikap otoritarianismenya. Gerakan mahasiswa selama ini sering dicurigai dan banyak mengalami pengebiran. Sikap penguasa belum menampakkan tanda-tanda yang maksimal dalam usaha mewujudkan negeri yang demokratis. Kebijakan pemerintah masih setengah hati dan ambivalen, karenanya eskalasi gerakan mahasiswa makin masif.

Dari pihak aparat sendiri makin menunjukkan sikap represifnya. Kekerasan oleh polisi pun akhirnya terjadi di Universitas Brawijaya (Unibra) Malang (10/2/03), yang sedianya dihadiri Megawati. Tapi adanya laporan Badan Intelijen Nasional (BIN) akan adanya demonstrasi pada acara Dies Natalis ke – 40 Unibra itu, akhirnya yang hadir hanya Mendiknas Abdul Malik Fajar. Kekerasan itu merupakan kali pertama di Jatim setelah era reformasi digulirkan beberapa tahun lalu. Selain itu secara bersamaan hampir saja terjadi pentrokan antara massa promega melawan mahasiswa di istana merdeka yang menuntut mundur Mega-Hamzah. Perkembangan lebih baru dan lebih terfokus lagi, yakni menargetkan jatuhnya pemerintahan Mega-Hamzah sebelum 2004.

Secara politis – Megawati – saat ini mendapat penilaian miring di hadapan publik. Sebagaimana penilaian Jeffrey Winters dari North Western University AS. Ia menilai Presiden Megawati Soekarnoputri tidak mampu menegakkan dan menjalankan demokrasi dan reformasi. Dan bahkan dapat dikatakan lebih parah (*Demage of seriously*) dari pada Soeharto. Kenyataan ini juga ditandai diajukannya dalam RUU Pemilu oleh FPDIP yang akan memindanakan penyeru gerakan Golput.

Pesan-pesan moral (*Moral - Command*) yang disampaikan mahasiswa memang perlu dan kian untuk menyalurkan aspirasinya. Jika letupan-letupan dari mahasiswa ini tidak segera direspon dan diajak berdialog dikhawatirkan aksi-aksi mahasiswa menjadi masif dengan eskalasi yang sulit diredam dan pada saatnya akan terjadilah (*Clash*) benturan-benturan, meskipun untuk saat ini volumenya masih kecil dan belum membesar, yang bisa berakibat pada bentrokan para pendukung partai yang berkuasa versus massa yang merasa ditindas oleh penguasa lalim.

Kran-kran demokrasi selama ini memang dirasakan oleh masyarakat masih sempit dan belum terbuka secara lebar. Ada kecemasan berlebihan dari pihak penguasa untuk membukanya. Jika ini terus dibiarkan, rasanya arah reformasi dan demokrasi akan stagnan, Jalan ditempat. Untuk menyasati hal itu seharusnya dicari langkah-langkah strategis, upaya perlindungan hukum bagi para demonstran agar tidak dilecehkan oleh penguasa. Sehingga benturan yang melibatkan massa dapat dicegah dan tidak meluas. Sebagai tujuannya untuk menegakkan reformasi dan demokrasi.

Dari berbagai benturan antar massa yang kali ini kerap terjadi. Beberapa hal perlu digaris bawahi, ada apa penyebab benturan-benturan itu sehingga amanat reformasi dan demokrasi terjadi mandul. *Pertama*, belum adanya kultur kesadaran (*awareness-culture*) membuka diri, apalagi terhadap arah kebijakan pemerintah (*purpose of policy government*) yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hingga kini masih diwarnai oleh kebijakan yang tidak populer, masih kental diwarnai pemikiran rezim Orde Baru syarat dengan KKN.

Kedua, prinsip-prinsip dasar (*basic of principle*) memecahkan akar persoalan masih belum terumuskan dengan baik. Contoh saja gaji legeslatif saat ini sangat mencolok, belum lagi ditambah uang hasil pelicinan untuk melegalkan sesuatu, yang mungkin nilainya cukup fantastis, ini meupakan ketimpangan, jika dibandingkan dengan gaji guru atau dengan dosen yang bertahun-tahun mengabdikan, tapi apa balasannya? Sepertinya pengabdian mereka kurang mendapat penghargaan yang selayaknya. Demikian pula dengan pencabutan subsidi listrik, BBM, telepon sehendaknya tidak dilihat dari segi teoritis matematisnya saja, tetapi harus

melihat segi praksisnya, bagaimana wacana sesungguhnya dalam hidup keseharian sehingga menyentuh akar permasalahannya. Sebab masyarakat saat ini sudah melek, melek dalam berbagai hal. Jadi kebohongan publik selama ini kentara sekali, masyarakat dapat membedakan mana siaga, buayat, dan asli manusia.

Ketiga, tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai bagi kalangan muda yang masih potensial dalam menggiatkan pembangunan negeri sehingga kebanyakan mahasiswa lebih menyukai berkutat dikampusnya lebih lama dari pada cepat lulus dan menjadi intelek pengangguran.

Keempat, sikap penguasa yang dilakukan oleh para penguasa negeri ini. Mulai dari presiden hingga tingkat RT dan pejabat-pejabat birokrasi lainnya sikap “berkuasa” yang melekat dalam dirin yakni kehendak berkuasanya dengan mengedepankan eksistensinya diri melalui penindasan terhadap yang lain dan mengesampingkan bawahan, inilah bibit kontradiktif. Padahal sebagai penguasa atau pimpinan sepatutnya dapat tampil sebagai figur pengayon, pelindung, tempat berbagi rasa suka maupun duka kepada sesamanya.

Kelima, belum maksimal kerja fasilitator yang independen seperti LSM untuk membela hak-hak raleyat sehingga apabila ada suatu problem seringkali mengalami kebekuan. Adapun DPR/DPRD yang merupakan wakil rakyat tak lebih hanyalah kepanjangan tangan penguasa, keberpihakannya kepada penguasa lebih dominan dibanding kepada rakyat.

Untuk meredam berbagai banturan yang kerap terjadi ini dibutuhkan pengkoordinasian antar elemen masyarakat. Setidaknya kelima aspek tersebut bisa dijadikan langkah dan strategi (*methode and strategic*) untuk menangkap fenomena-fenomena yang muncul. Diharapkan tidak akan terjadi penangkapan mahasiswa secara represif. Secara berkelanjutan diharapkan demokrasi akan segera tercipta untuk mengubur otoritarianisme gaya-gaya baru - dengan segala cara apa pun - yang telah memasang kebebasan politik anak negeri. Menurut nenek moyang, “*negeri yang gemah ripahlah jiwane, murah sandang pangan*”.

Ini harus benar-benar dapat dibuktikan dan dirasakan oleh penduduk negeri, bukan slogan semata. **

Duta Masyarakat, Kamis, 20 Februari 2003

Peta Politik Pasca-Kasasi Akbar Tandjung

Terkabulnya kasasi Akbar Tandjung dalam kasus korupsi dana nonbujeter Bulog senilai Rp 40 miliar oleh Mahkamah Agung (MA) yang diputuskan 12 Pebruari menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Mulai dari yang setuju sampai yang tidak setuju. Mereka yang kontra terhadap vonis bebas Akbar, utamanya di kalangan kampus dan rival-rival politiknya, baik dari internal parpol tersebut maupun eksternal parpol. Apalagi yang mengkategorikan Akbar sebagai politik busuk jelas sangat kecewa atas putusan tersebut, yang dianggap tidak memihak *wong cilik*. Terlepas dari setuju dan tidak setuju atas putusan MA, bebasnya Akbar kali ini tentunya akan membawa dampak yang signifikan arah ke depan (*step to the front*) bagi partai politik berlambang pohon beringin.

Kemenangan Akbar Tandjung di MA kiranya dapatlah dinilai sebagai simbol kemenangan kekuatan *status quo*. Dan kekuatan *status quo* saat ini memang masih diperhitungkan oleh parpol baru maupun lama. Sebab kekuatan *status quo* yang berkuasa hampir 32 tahun ini setidaknya ada yang tiarap atau sedang dan mulai menyusun kekuatan, yang hampir dapat diperkirakan ada di semua lini, apakah institusi swasta maupun negeri dengan cara terbuka (*opened*) maupun sembunyi-sembunyi (*secretly*). Kekuatan inilah yang memungkinkan sekali dapat mempengaruhi keputusan MA mengapa Akbar bebas? Tidak lain dapat saja terjadi dari para Hakim Agung ada semacam ketakutan akan karir yang sedang dijabatnya saat ini dan mungkin juga adanya tekanan (*pressure*) atau ancaman yang akan mengancam dirinya maupun keluarga. Atau juga faktor-faktor finansial lain yang menyangkut perolehan keuntungan baik politis maupun ekonomis.

Kenyataan ini merupakan fenomena sikap dari para penguasa negeri ini baik yang memegang kekuasaan di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mereka cenderung menggunakan cara-cara represif maupun destruktif, bila sudah menyangkut karir jabatan

atau politiknya terancam, cara apapun dilakukan. Sehingga dapat saja terjadi apa yang dimainkan aktor lembaga hukum negara dalam hal ini MA untuk memutuskan sesuatu perkara memunculkan pikiran apakah keselamatan karir dan jabatannya tidak terancam. Menyebabkan sikap yang diperankan cenderung bertolak belakang dengan hati nuraninya dan fakta yang ada. Apalagi yang menjadi terdakwa adalah pimpinan legislatif, Ketua Umum DPR Akbar Tandjung yang telah memilihnya, tentu ada perhitungan lain. Sikap *kongkalikong* antara terdakwa dan yang didakwa bisa jadi dipermainkan dalam *sandiwara hukum*, karena jika penegak hukum (Hakim Agung) itu berseberangan dengan pimpinan legislatif, bisa jadi karir politiknya akan berakhir. Untuk sama-sama tidak mengakhiri karirnya tentunya harus bekerjasama, namun dari sini rasa keadilan telah dikesampingkan dan inilah pelanggaran bagi penegak hukum. Adakah institusi untuk mengadili pelaku penegak hukum semacam MA? Oleh karena itu harus adanya institusi yang independen di negeri ini untuk rakyat dalam menangani penegak hukum yang tidak konsekwen dan cenderung menyalahgunakan jabatannya yang mengadili orang-orang penting yang berkuasa di negeri ini.

Sebagai contoh, dapat saja terjadi karena faktor politis, apa yang dialami Hakim Amiruddin Zakaria SH yang dulu sebagai mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Jakarta Pusat yang memvonis Akbar 3 tahun penjara, lalu dialihtugaskan di PT Kendari, dan saat ini menurut pengakuannya minggu depan mau mengundurkan diri dari jabatannya. Sikap yang diambil memungkinkan kekecewaannya terhadap putusan MA, meski ia menghormati atas putusan yang terjadi.

Berkaca dari kasus Akbar Tandjung tersebut, bila publik mampu menangkap makna keadilan (*meaning justice*) yang telah diputuskan MA, yang pada akhirnya Akbar mendapatkan vonis bebas tentulah tidak akan *kaget*. Masyarakat dapatlah menilai dengan kaca mata hati nuraninya sendiri putusan MA itu, apakah sesuai dengan kebenaran dan rasa keadilan. Dan ukuran adil dalam menentukan suatu perkara memang relatif tergantung dari kemampuan masing-masing orang dalam kepintaran dan pengetahuan yang didapatkannya, minimal ada Undang-Undang yang mengaturnya, yang tidak kalah pentingnya adalah

kebenaran hati nuraninya yang siapapun orangnya tidak bisa membohonginya. Setidaknya dari fakta-fakta yang ada konsekwensi logisnya dari kasus Akbar, mungkin saja ia dapat dipersalahkan dan tidak pantas memperoleh kasasi bebas. Tetapi palu sudah diketok oleh MA, kenyataannya Akbar bebas – ini dapat membawa opini publik – bahwa Akbar pantas dianggap pihak yang memang benar-benar tidak bersalah.

Kenyataan di lapangan sangatlah berbeda dengan teori yang ada, sebagaimana kasus Akbar secara teori dari putusan MA dia dapat dianggap tidak bersalah. Tetapi sesuaikah dengan realita jawaban di masyarakat? Jika fenomena itu ditangkap publik yang cerdas dan tidak *awam* tentang hukum tentu akan berpikir dua kali atau lebih tentang kasus Akbar. Mereka tidak segera memutuskan pendapat bahwa Akbar bukanlah pihak yang bersalah, tetapi perlu dikaji kembali sebab keputusan MA itu telah menjadi sorotan masyarakat, menjadi polemik dan perdebatan diberbagai kalangan pakar hukum maupun akademis, yang bisa jadi dari kesepakatan para pakar hukum dan masyarakat akan membuahkkan hasil bahwa “Akbar tidak layak” memperoleh vonis bebas. Maka dengan kesepakatan ini memungkinkan opini publik berubah, bahwa Akbar telah bersalah. Jika demikian yang terjadi kemungkinan besar publik tidak akan memilih Akbar Tandjung dalam Pemilu tahun ini sebagai Calon Presiden (Capres) dari konvensi Partai Golkar.

Sekarang yang menjadi agenda bagi Akbar adalah apakah dia benar-benar dapat membawa opini publik yang saat ini hasil kasasinya menjadi kemelut di berbagai pakar hukum dan masyarakat. Jika Akbar dapat membawa opini publik bahwa kasasinya diterima oleh MA sebagai orang yang tidak bersalah. Hal ini akan mampu mencitrakan dirinya dapat dianggap sebagai orang yang layak dapat dijadikan pimpinan di negeri ini, tentunya akan mampu meraih dan mendongkrak perolehan suara Partai Golkar dalam Pemilu sebagai kendaraannya yang akan mengantarkannya jadi orang nomor satu RI. Sebaliknya, jika opini publik telah berbalik bahwa vonis bebasnya Akbar oleh MA adalah sebagai permainan konspirasi politik tingkat tinggi yang dimainkan elit kekuasaan, berarti citra Akbar yang merupakan simbol Partai Golkar akan menjadi runtuh. Citra ini akan semakin

mengurangi perolehan dukungan suara bagi Partai Golkar dalam Pemilu tahun ini. **

DUTA MASYARAKAT, Rabu, 18 Februari 2004

Menyikapi Kenakalan Anak

Fenomena kenakalan anak dapat ditengarai sebagai suatu sebab munculnya sikap atau perubahan yang dialami oleh si anak, dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, apakah eksternal maupun internal, yaitu disebabkan oleh pengaruh orang lain atau oleh keinginannya sendiri. Sebagai orang tua tentu harus memperhatikan faktor kelainan kepribadian yang menimpa puteranya tersebut dan hal ini secepatnya orang tua menangani secara serius, karena sikap seperti itu dapat merugikan dirinya sendiri di samping juga akan merugikan orang lain.

Sebenarnya berbagai perubahan yang terjadi pada diri anak bukanlah merupakan sesuatu yang datangnya secara tiba-tiba. Perubahan itu terjadi secara bertahap, tetapi karena orang tua kurang memperhatikan segala macam perubahan yang terjadi pada anaknya sehingga mereka kurang mampu melakukan antisipasi secara cepat. Perubahan pada diri anak adalah suatu hal yang wajar sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan sosialnya. Walaupun demikian, orang tua harus memperhatikan gejala perubahan itu, mengingat anak-anak kita belum mempunyai pedoman hidup yang pasti. Perhatian yang kurang akan membawa anak pada perkembangan yang salah.

Realita membuktikan bahwa terdapat berbagai macam sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak mereka. Dari pendapat para ahli dan berbagai penelitian menyimpulkan bahwa sikap atau perlakuan orang tua itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan atau pembentukan pribadi anak. Perbedaan sikap dan perlakuan orang tua tersebut dapat disebabkan berbagai faktor. Elizabeth Hurlock mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sikap orang tua itu antara lain : (1) nilai-nilai budaya, (2) penyesuaian kepribadian orang tua, (3) perasaan puas terhadap peranan orang tua, (4) perasaan memadai terhadap peranan orang tua, (5) penyesuaian diri dan kebahagiaan dalam perkawinan, (6) kepuasan orang tua

terhadap jenis kelamin anak, jumlah dan sifat-sifat khas anak, dan (7) kesediaan orang tua untuk berkorban bagi anak, termasuk dalam ekonomi. Dari berbagai sikap orang tua yang seperti ini akan berhubungan dengan sikap dan perubahan yang ada pada diri anak-anaknya.

Sebagai penanggung jawab utama tentu orang tua perlu mengetahui berbagai perubahan sikap anak ke arah negatif yang dapat dikategorikan sebagai “kenakalan anak”. Orang tua juga harus jeli memantau sejauh mana perilaku anak tersebut, sehingga anak tidak terlambat dalam perkembangannya. Untuk dapat mengenali perubahan yang terjadi pada anak-anak, orang tua perlu mengetahui berbagai kenakalan yang biasa dan sering dilakukan anak-anak, serta cara mengatasinya. Di antara bentuk-bentuk kenakalan anak sangat variatif, di sini hanya dikemukakan beberapa hal yang kerap kali terjadi:

1. Berbohong

Berbohong adalah upaya anak untuk memperdaya orang lain. Untuk anak-anak di bawah umur lima tahun, berbohong adalah perbuatan yang tidak disadarinya serta bersifat spontan. Tetapi bagi anak-anak usia sekolah, berbohong merupakan perbuatan yang sudah disadari dan memiliki motif tertentu. Untuk mengatasi kebohongan yang diperbuat anak, maka orang tua wajib menjelaskan kepada anak akan arti sebuah kejujuran. Kejujuran sebagai suatu sikap yang terpuji haruslah dikenalkan kepada anak sejak dini. Di samping itu orang tua juga wajib berusaha untuk selalu kontrol diri (self control) dan mawas diri (introspeksi) atas segala sikap dan perbuatannya, terutama ketika dihadapan anak-anak. Sadarilah bahwa anak-anak akan selalu meniru apa saja yang dilakukan orang tua.

2. Mencuri

Praktik anak senang mencuri bukan hanya terjadi di kalangan anak kurang berada saja, tetapi juga dialami mereka yang berasal dari keluarga kaya. Di kalangan anak-anak banyak terjadi pencurian tetapi bukan karena tertarik kepada barang yang dicuri tersebut, melainkan sekedar mengikuti kemauan hati saja.

Kebiasaan mencuri di kalangan anak, ini merupakan masalah yang cukup serius karena di samping merugikan diri anak yang bersangkutan, kerugian yang paling besar terdapat pada orang lain yang menjadi objek pencurian itu. Apabila kebiasaan ini dibawa sampai dewasa, maka ia telah melanggar hukum formal di samping hukum agama. Orang tua mengatasi hal ini harus bijaksana menghadapi yang diperbuat si anak tadi, misalnya dalam hal menyuruh mengembalikan barang-barang setelah dicurinya, sampaikanlah secara bijaksana sehingga anak menyadari bahwa perbuatan mencuri itu hal yang sangat tidak terpuji. Berilah pengertian kepada anak akan hak-hak orang lain yang harus kita hargai dan kita hormati.

3. Senang berkelahi dan bertengkar

Masa anak-anak adalah masa subur-suburnya perkembangan secara fisik. Oleh karena itu perkelahian sesama mereka merupakan kejadian yang umum sifatnya. Permasalahan yang sekecil apapun bisa menyebabkan pertengkaran dan perkelahian antar mereka.

Upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk menanggulangi kebiasaan senang bertengkar dan berkelahi ini adalah dengan mengarahkan anak kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan diterima masyarakat; misalnya dengan berolah raga, bela diri, aktif pengajian dan sebagainya. Dengan terlenanya anak pada berbagai kegiatan yang ada, maka mereka tidak memiliki lagi waktu atau kesempatan untuk bentrok dengan sesama teman. Usaha lain adalah dengan memberikan pengertian akan arti sportifitas kepada anak-anak, sikap sportif inilah salah satu hal yang mengurangi kebiasaan anak untuk senang bertengkar dan berkelahi.

Dengan sikap dan perlakuan orang tua yang semacam itu, peduli terhadap perkembangan anak dan memberikan perhatian kepada anak secara serius dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, anak akan merasa tentram dan aman. Begitu pula berbagai pendekatan yang dilakukan orang tua diharapkan sikap anak dapat berubah, terutama melalui pendekatan religius (agama) yang merupakan kunci bagi keberhasilan orang tua dalam mendewasakan anak-anaknya. **



BIOGRAFI PENULIS

Akhiyat, terlahir di Mojokerto 17 Desember 1971, alumni Program Doktorat (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Program Studi Dirasah Islamiyah tahun 2014. Ia tercatat sebagai alumni Pascasarjana (S2) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Program Studi Bahasa dan Sastra. Jenjang S1 ditempuh di IAIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat. Jenjang pendidikan dasar dimulai dari SDN Ngimbangan Mojosari-Mojokerto, SMP Wahid Hasyim X Prambon-Sidoarjo, MAN Mojosari-Mojokerto. Ia pernah nyantri di Pondok Pesantren “Miftahul Huda” Ngemplak-Ngimbangan Mojosari Mojokerto yang diasuh KH. Ahmad Qolyubi, sempat pula nyantri di Pondok Pesantren “Darul Hikmah” Mojosari yang diasuh KH. Qusaeri Mansur, dan di Pondok Pesantren “Al-Haqiqi Al-Falahi Joyonegoro” Sidosermo (Ndresmo) Surabaya yang diasuh KHR. Mas Luqman Hakim Bin Abdul Qodir.

Pengalaman bekerja penulis diawali bekerja sebagai ASN di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam. Ia pernah menjadi Penyuluh teladan tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2007. Saat ini, ia tercatat sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Jember Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI). Ia dipercaya pula mengampu mata kuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pengalaman mengajar lainnya yang pernah dilakukan yaitu sebagai dosen luar biasa (DLB) di Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto.

Penulis yang beristrikan **Ifanul Khabibah, SE.** telah dikaruniai tiga anak yaitu **Nailis Anastasyia Maulidiyah Khabibatuzzahroh, Ahmad Nabil Tifaquttaqiyuddin, dan Faza Adiatma Prabaswara.** Di tengah kesibukannya sebagai dosen di IAIN Jember, ia masih juga menyempatkan bergabung sebagai tim ahli dalam bidang iptek di ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama)

Kabupaten Mojokerto, dan aktif pula dalam organisasi DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kabupaten Mojokerto. Di samping itu, ia juga sebagai Ketua Laboratorium Pusat Kajian Sejarah Islam Pandhalungan (PAKSIP) IAIN Jember, dan saat ini memegang sebagai Direktur LKP2I (Lembaga Kajian Pengembangan Pengetahuan Islam) Mojokerto. Penulis turut aktif pula dalam Komunitas Masyarakat Sejarah Mojokerto (KOMASMOXER). Ia dipercaya pula sebagai tim Mitra Bestari di Jurnal As Salam STAIN Gajah Putih Takengon-Aceh.

Berbagai hasil karya penulis telah dipublikasikan dalam bentuk buku *"Tuhan Begitu Dekat"* diterbitkan Pena Media Utama tahun 2010. Karya lain yang diterbitkan Jurnal Religio UIN Sunan Ampel Surabaya *"Perbandingan Dimensi Mistis dan Dialogis dalam a Commond Word menurut Canner Dagli dan John Chryssavogis"* tahun 2012. Diterbitkan Jurnal As Salam STAIN Gajah Putih Takengon-Aceh *"Tasawuf dan Akulturasi Budaya"* tahun 2016. Diterbitkan jurnal al-'Adalah IAIN Jember *"Fenomena Gerakan Radikal Islam Kontemporer"* tahun 2016. Jurnal Didaktika Religia IAIN Kediri *"Akseptabilitas Konsep Integrasi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional"* tahun 2016. Jurnal Al-Tahrir IAIN Ponorogo *"Islam Nusantara antara Ortodoksi dan Heterodoksi"* tahun 2017. Jurnal Inovasi Balai Diklat Keagamaan Surabaya *"Passing Over Teologi Beragama"* tahun 2017.